



# **SKENARIO PEMBANGUNAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

***Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D***  
***Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan***  
**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Musrenbang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022**  
**“Pemantapan Pembangunan Menuju Bangka Belitung yang Sejahtera, Maju,  
Unggul dan Mandiri dalam Pemanfaatan Potensi Daerah secara Optimal”**

**Bangka, 28 Agustus 2017**

# PENDAHULUAN

# MASA DEPAN ASIA "CENTER OF GLOBAL ECONOMY"

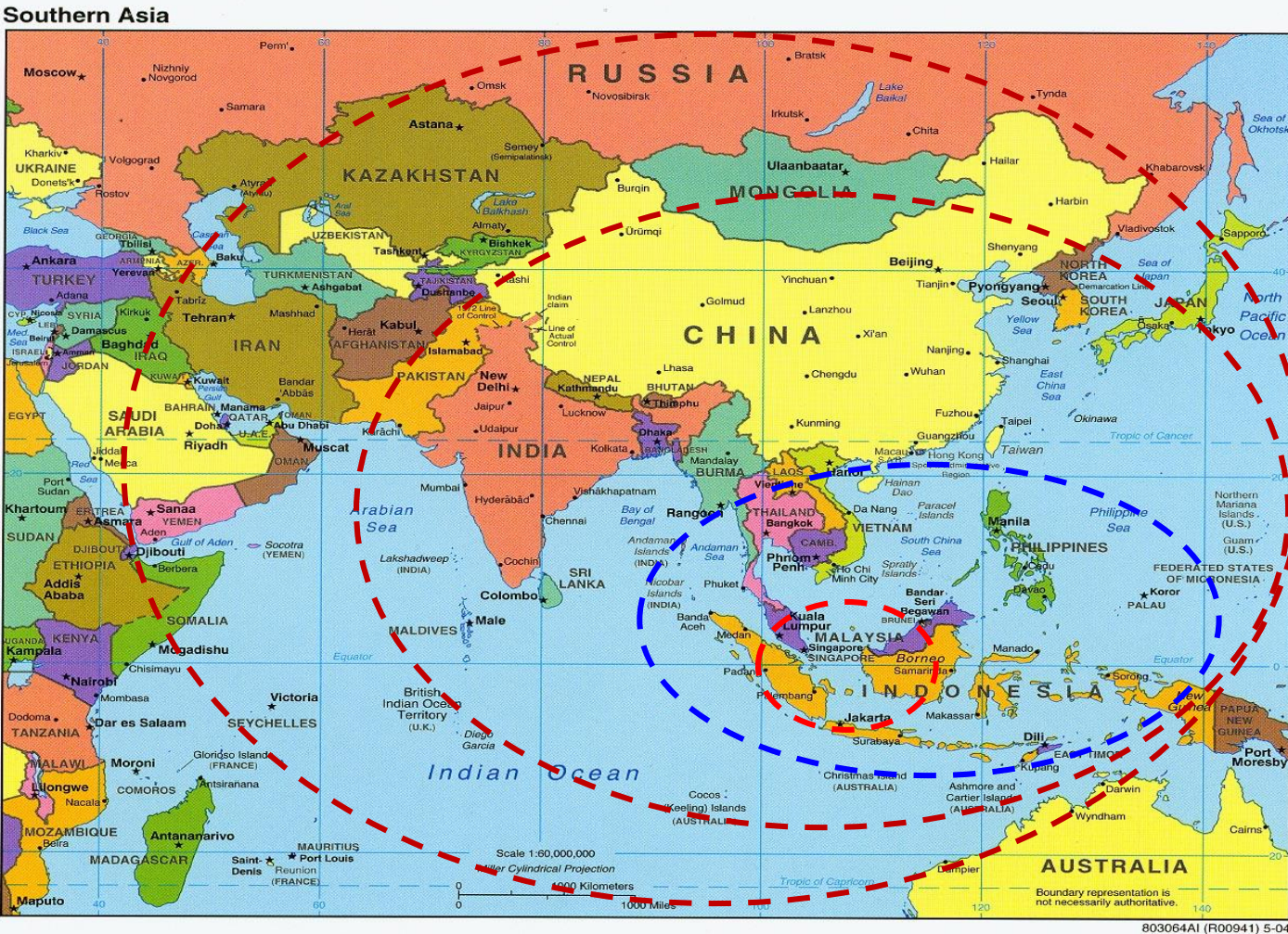


## STANDARDISASI

- Sistem Manajemen → *Performance Based Management*
- Sistem Pelayanan → Kebahagiaan, Kepuasan, Kenyamanan, Keamanan, Kecepatan, Ketepatan, Kelengkapan
- Sistem Transportasi → Konektivitas Antarwilayah
- Sistem Logistik → Efisiensi waktu, tenaga dan biaya
- Sistem Informasi → akurat, tepat waktu, uptodate dan terpadu

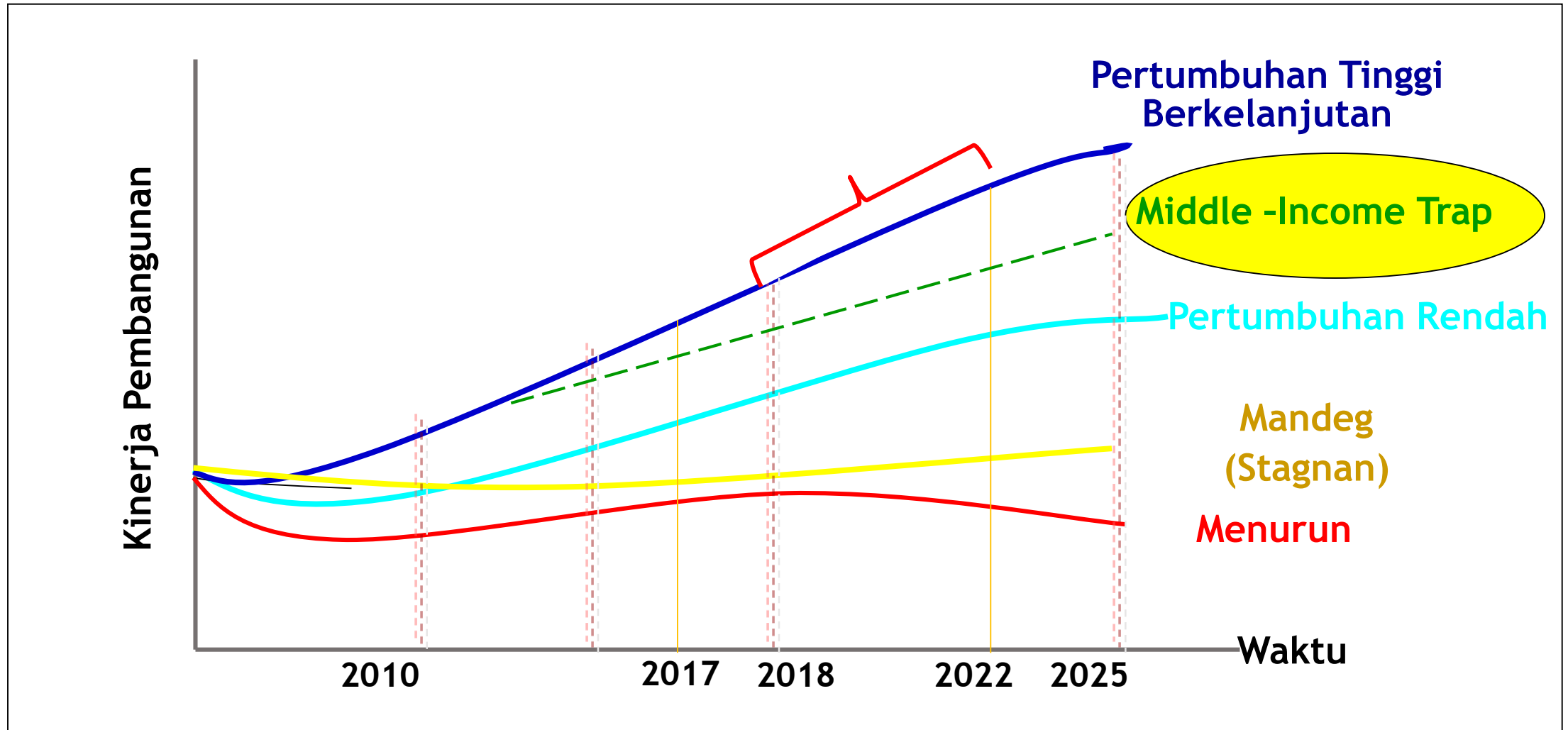
# POSISI DAN PERAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- BAGAIMANA MEMBANGUN BASIS KEUNGGULAN BABEL? → **PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN: DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN/KOTA.**
- BAGAIMANA MEMBANGUN BABEL SECARA BERKELANJUTAN → **MANAJEMEN ASSET DAERAH (SDA DAN LH, SOSIAL-BUDAYA, EKONOMI dan PENGETAHUAN)**
- BAGAIMANA MEMBANGUN BABEL YANG AMAN? → **PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN MITIGASI BENCANA.**



**Bagaimana BABEL MEMBANGUN dan MEMBANGUN BABEL?**

# BAGAIMANA MASA DEPAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG?



Pertumbuhan ekonomi berkualitas: pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pencegahan kerusakan lingkungan.

# SKENARIO PEMBANGUNAN DAERAH

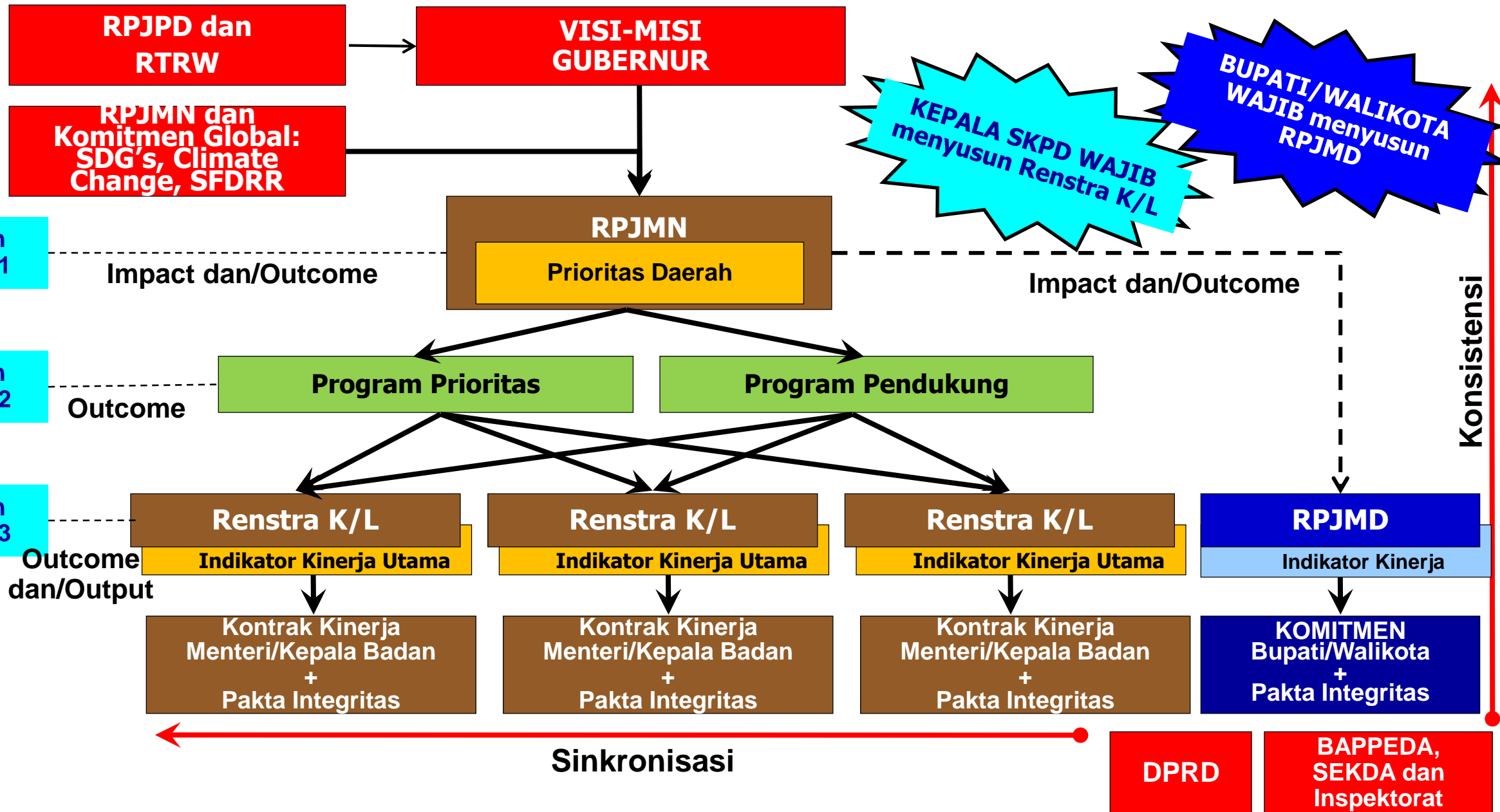
Skenario pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tiga alternatif:

- 1. Skenario Normal (Business as Usual):** Mempertahankan kinerja pembangunan melalui kebijakan dan program pembangunan yang sudah ada;
- 2. Skenario Moderat:** Mendorong (akselerasi) percepatan pembangunan melalui kebijakan dan program percepatan pembangunan
- 3. Skenario Optimis:** Melakukan transformasi (perubahan) dan akselerasi (percepatan) pembangunan melalui pelaksanaan sistem dan manajemen berbasis kinerja, penajaman kebijakan dan program, pengendalian dan evaluasi, pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan investasi.

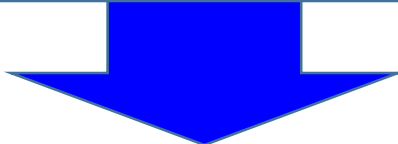
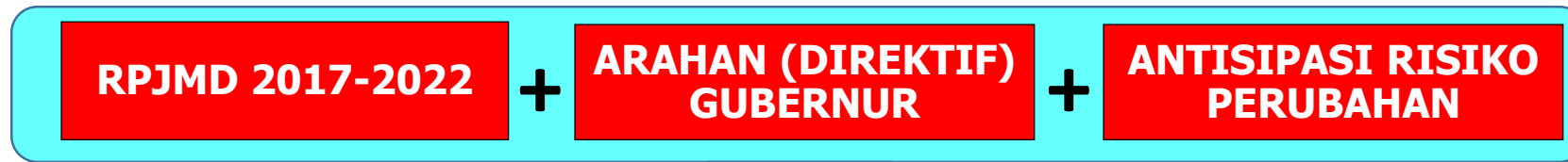
# KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMD



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



Sasaran Tingkat 3

Outcome dan/Output

Sasaran Tingkat 4

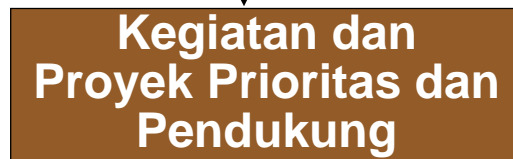
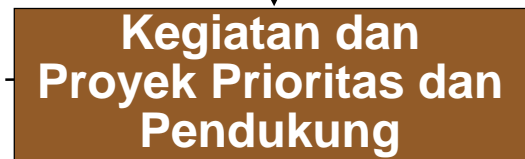
Outcome dan/Output

Sasaran Tingkat 5

Outcome dan Output

Sasaran Tingkat 6

Input dan Output



Konsistensi

Sinkronisasi



**POKOK-POKOK KEBIJAKAN NASIONAL  
DAN KOMITMEN GLOBAL DALAM  
PERUMUSAN SKENARIO PEMBANGUNAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2017-2022**

# SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2016-2045

5,1% per tahun

## ▪ RENDAH

- Business as usual
- Gejala ekonomi global yang berpengaruh besar terhadap ekonomi ekonomi Indonesia atau harga komoditi harga komoditi rendah

5,7% per tahun

## ▪ SEDANG

- Business as usual (reformasi tidak berjalan sesuai harapan
- Harga komoditi relatif tinggi
- Pencapaian target pokok seperti 30 tahun sebelumnya

6,4% per tahun

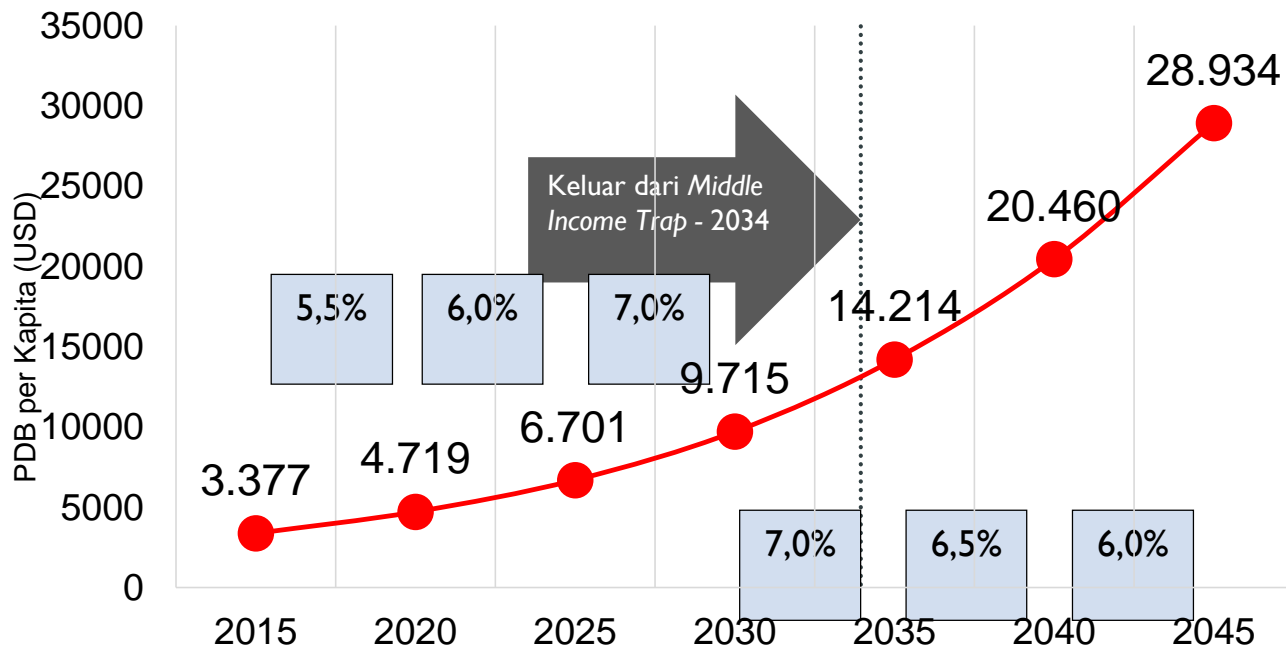
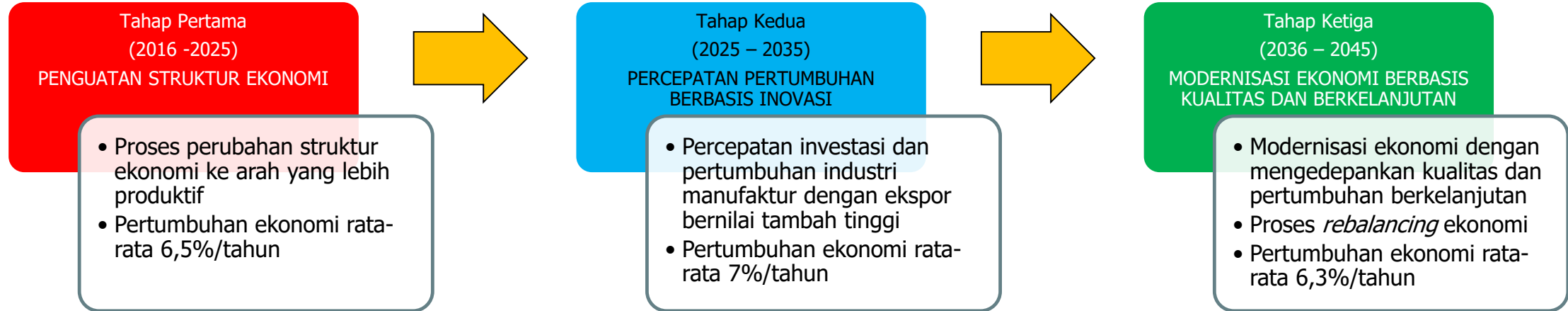
## ▪ TINGGI

- Reformasi struktural berjalan sesuai diharapkan
- Target-target pokok tercapai dengan baik

INDIKATOR	1986-2015	SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2016-2045		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata (%/tahun)	5,1	5,1	5,7	6,4
Pertumbuhan Penduduk (%/tahun)	1,50	0,71	0,71	0,71
Ranking PDB Dunia *)	16	8	7	4
PDB per Kapita (USD) *)	3374	19794	23201	28934
Tahun ke luar dari <i>Middle Income Trap</i>		2038	2037	2034
<b>INVESTASI</b>				
- Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	6,4	5,4	6,2	7,3
- Peranan terhadap PDB (%) *)	32,8	33,1	37,6	39,0
<b>EKSPOR DAN KETERBUKAAN EKONOMI</b>				
- Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	7,0	5,8	6,5	7,9
- Keterbukaan [(Ekspor+Impor)/PDB] (%) *)	34,0	49,2	51,5	54,0
<b>INDUSTRI</b>				
- Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	6,3	5,2	6,5	7,8
- Peranan terhadap PDB (%) *)	21,0	22,5	26,9	32,0
<b>PERTANIAN</b>				
- Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	3,1	3,0	3,0	3,0
- Peranan terhadap PDB (%) *)	13,5	7,8	7,0	6,5
*) Akhir Periode				

# SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI

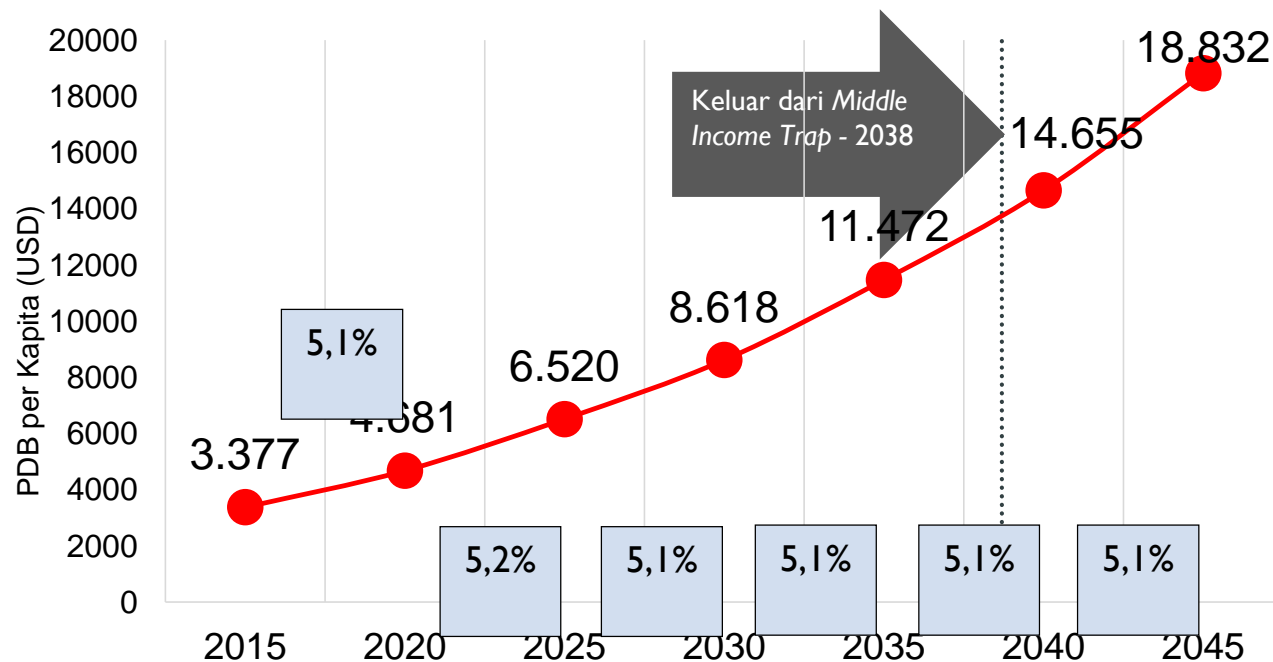
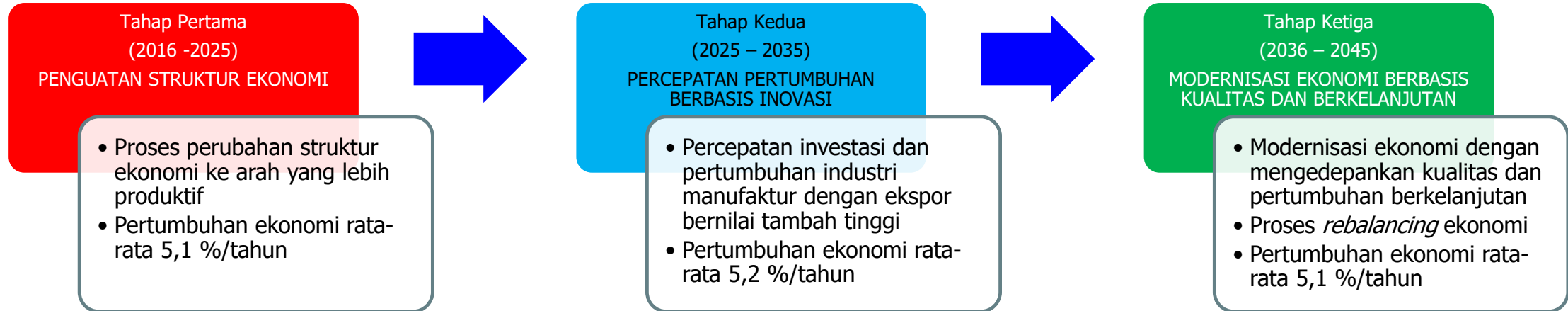
Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,4%/tahun. Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi (ke luar dari *middle income trap*) tahun 2034 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-4 tahun 2045



Rank	Negara	PDB (USD Triliun)
1	Cina	70,9
2	Amerika Serikat	56,3
3	India	18,5
4	Indonesia	9,2
5	Inggris	9,0
6	Jepang	8,1
7	Jerman	8,0
8	Perancis	6,5
9	Brazil	5,2
10	Australia	5,1

# SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH

Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,1%/tahun. Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi (ke luar dari *middle income trap*) tahun 2038 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-8 tahun 2045



Rank	Negara	PDB (USD Triliun)
1	Cina	70,9
2	Amerika Serikat	56,3
3	India	18,5
4	Inggris	9,0
5	Jepang	8,1
6	Jerman	8,0
7	Perancis	6,5
8	Indonesia	6,2
9	Brazil	5,2
10	Australia	5,1

# VISI MISI PRESIDEN RI 2015-2019 NAWACITA DAN UU DESA

## VISI

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

### 7 (TUJUH) MISI PRESIDEN

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

**Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.**

**Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;**

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

### NAWACITA (9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

**2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.**

**3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.**

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

**5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.**

**6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.**

**7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.**

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

### TUJUAN UU DESA

#### Pembangunan Desa

a. Meningkatkan kualitas hidup manusia.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

c. Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pembangunan Kawasan Perdesaan

Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Mengutamakan **KEBERSAMAAN, KEKELUARGAAN, KEGOTONGROYONGAN** guna mewujudkan Pengarusutamaan **PERDAMAIAN DAN Keadilan Sosial**

**1. DESA YANG MANDIRI, KUAT, MAJU, DEMOKRATIS**  
**2. KAWASAN PERDESAAN yang MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH dan BERDAYA SAING TINGGI**

**MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, DAN SEJAHTERA**

**1. Pemerintah**  
**2. Pem. Provinsi**  
**3. Pem. Kab/kota**  
**4. Pem. Desa**  
**5. Swasta, Univ, dll**

# STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

## NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

## 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

### DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

### DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

### DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

## KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

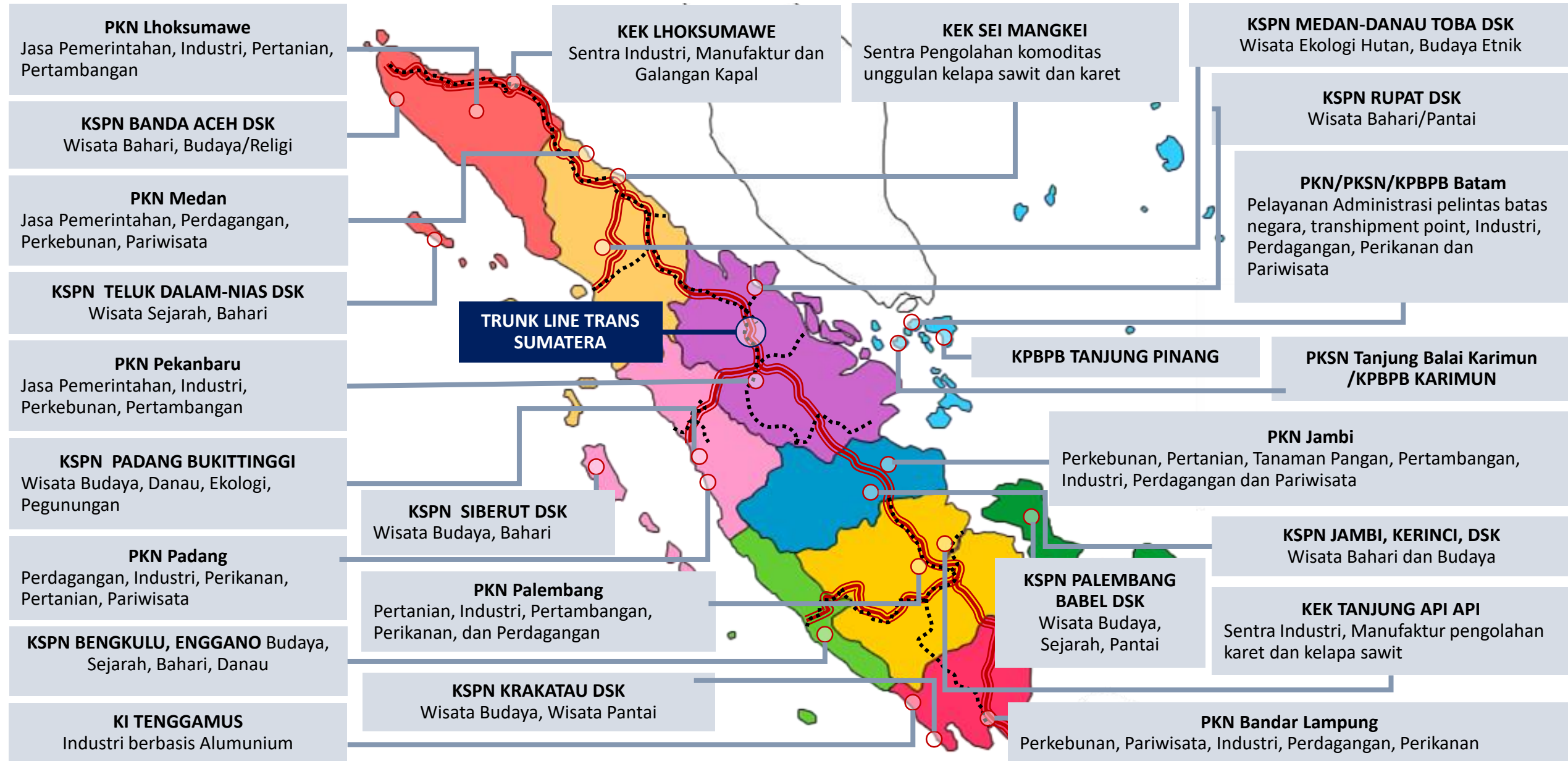
Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

## QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

# RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA



# RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2018

## KEK & KI SEI MANGKEI

Kab. Simalungun, Sumut

### Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pembangunan rumah susun
- Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan 3,5 km dan 6,5 km
- Cakupan Geoid teliti sebagai referensi tinggi bagi peta dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK dan KI

## KPBPB Sabang



## Pariwisata Danau Toba

Kab. Samosir, Sumut

### Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pembangunan Jalan Tol Teluk Tinggi-Pematang Siantar
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu KSPN Danau Toba
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu KSPN Danau Toba
- Bandar Udara Sibisa (Parapat) KSPN Danau Toba

## KI Kuala Tanjung

Jalan Bebas Hambatan Medan -Kuala Namu

## KPBPB Batam, Bintan, Karimun

## KEK TANJUNG API-API

Kab. Banyuwasin, Sumatera Selatan

## KEK TANJUNG KELAYANG

Kab. Belitung, P. Bangka Belitung

### Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin
- Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik)
- Pelebaran Jalan Nasional Tanjung Pandan - Tanjung Tinggi
- Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK

## KI Tanggamus

Kab. Tanggamus, Lampung

Wilayah Sumatera 2018	
Target Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,35
Target Sasaran Tingkat Kemiskinan	10,25
Target Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80

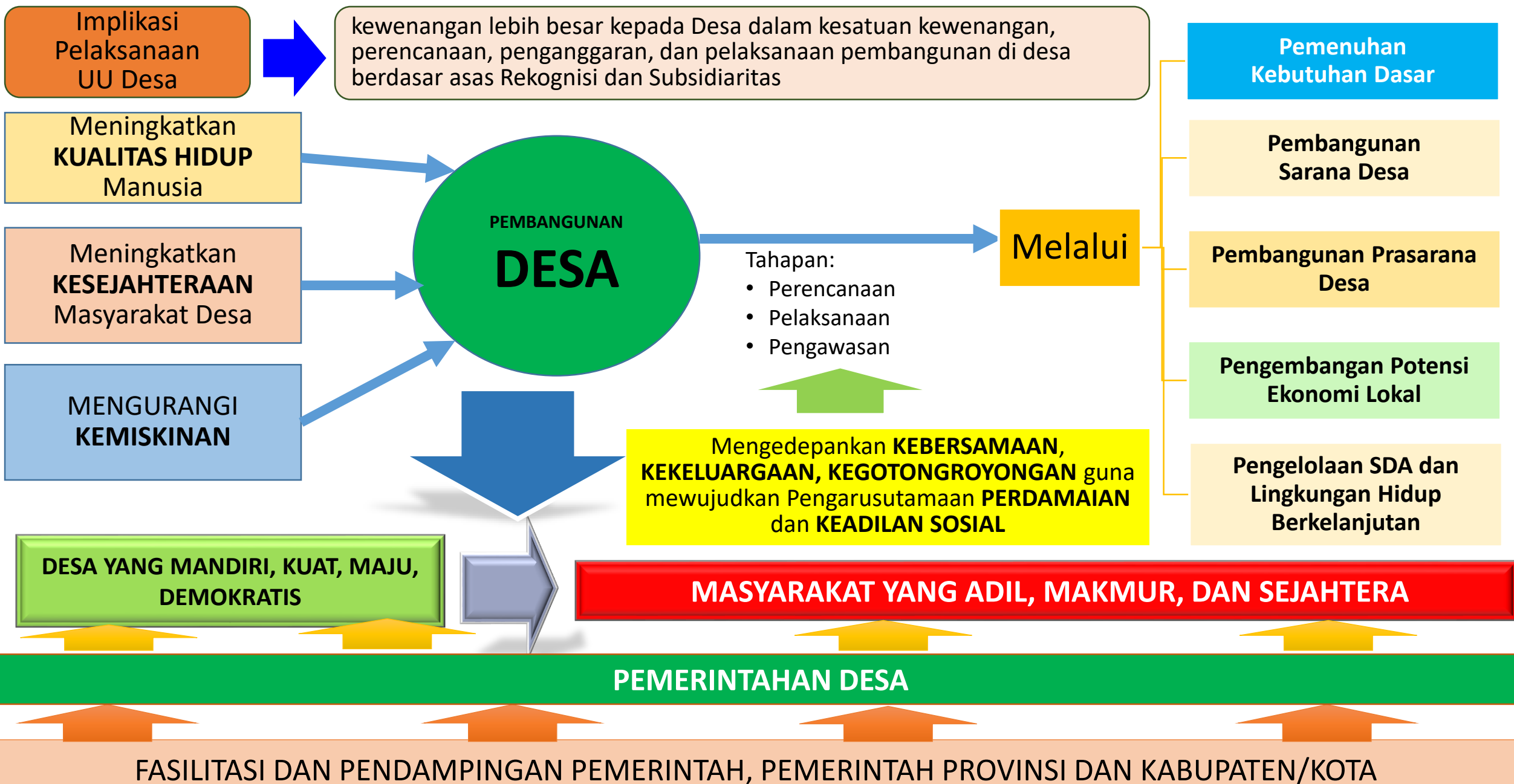
- Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Industri Pengolahan
  2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
  3. Pertambangan dan Penggalian
  4. Perdagangan besar dan eceran
  5. Konstruksi

- Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :
1. Provinsi Kep.Riau
  2. Provinsi Aceh
  3. Provinsi Sumatera Utara.
  4. Provinsi Kep. Bangka Belitung

- Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Bengkulu
  2. Provinsi Aceh
  3. Provinsi Lampung
  4. Provinsi Sumatera Selatan
  5. Provinsi Sumatera Utara

- Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
- Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

# TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (UU 6/2014 tentang Desa)



# KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2015-2019

## UU NO 6 TAHUN 2014 tentang DESA

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- Pembangunan Sarana Desa
- Pembangunan Prasarana Desa

- Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

- Pemerintahan Desa

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

Faktor Kunci:  
• Koordinasi  
• Sosialisasi  
• Fasilitasi  
• Supervisi  
• Pendampingan

- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai kondisi geografis

- Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

- Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota

- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan

- Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- Pengembangan sumber daya manusia, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa

## TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA 2015-2019

### MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, DAN SEJAHTERA

DESA YANG MANDIRI, KUAT, MAJU, DEMOKRATIS

PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN

Berkurangnya 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang

Meningkatnya paling sedikit 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri

# TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

- Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals=MDG*) akan segera berakhir pada tahun 2015;
- Kerangka kerja baru pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan dan membangun kehidupan yang bermartabat bagi semua.
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals=SDG*) memuat 17 tujuan dan 169 sasaran untuk menghapus kemiskinan, melawan ketidakadilan, serta mengatasi iklim selama 15 tahun ke depan
- Ada 5 pondasi dari SDG, yaitu: manusia, bumi, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan.

**1** NO POVERTY



**2** ZERO HUNGER



**3** GOOD HEALTH AND WELL-BEING



**4** QUALITY EDUCATION



**5** GENDER EQUALITY




**6** CLEAN WATER AND SANITATION



**7** AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



**8** DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



**9** INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



**10** REDUCED INEQUALITIES



**11** SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES



**12** RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



**13** CLIMATE ACTION



**14** LIFE BELOW WATER



**15** LIFE ON LAND



**16** PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



**17** PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



# **ANALISIS KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

# PERTUMBUHAN DAN PENGANGGURAN

## Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	1,13	1,74	0,56	-0,43	-2,61
SUMATERA UTARA	5,11	4,96	4,65	3,88	3,81
SUMATERA BARAT	4,88	4,88	4,69	4,51	4,10
RIAU	2,78	1,06	-0,14	0,12	-2,24
JAMBI	5,82	5,06	4,92	5,48	2,45
SUMATERA SELATAN	4,73	5,23	3,78	3,22	3,06
BENGKULU	4,97	4,98	4,28	3,74	3,45
LAMPUNG	5,16	5,09	4,48	3,85	3,95
KEP. BANGKA BELITUNG	4,52	3,18	2,92	2,43	1,89
KEP. RIAU	3,53	4,27	3,97	3,51	3,03
DKI JAKARTA	5,51	5,34	4,92	4,81	4,81
JAWA BARAT	4,78	4,82	4,70	3,52	3,50
JAWA TENGAH	4,40	4,47	4,27	4,46	4,66
DI YOGYAKARTA	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74
JAWA TIMUR	5,66	5,90	5,37	5,18	4,80
BANTEN	4,53	4,40	4,31	3,19	3,16
BALI	5,31	5,63	5,40	5,46	4,82
NUSA TENGGARA BARAT	-5,29	-2,92	3,73	3,68	19,69
NUSA TENGGARA TIMUR	3,85	3,67	3,65	3,32	3,31
KALIMANTAN BARAT	3,68	4,13	4,32	3,37	3,20
KALIMANTAN TENGAH	4,45	4,36	4,89	3,82	4,64
KALIMANTAN SELATAN	4,91	3,99	3,43	3,03	2,09
KALIMANTAN TIMUR	3,63	2,73	0,15	-0,72	-3,45
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	4,11	-0,68
SULAWESI UTARA	4,87	5,60	5,17	5,14	5,00
SULAWESI TENGAH	7,91	7,67	7,77	3,37	13,74
SULAWESI SELATAN	6,86	7,63	6,43	6,39	6,04
SULAWESI TENGGARA	8,18	9,22	5,20	4,03	4,68
GORONTALO	5,91	6,14	5,94	5,57	4,59
SULAWESI BARAT	8,59	7,15	4,89	6,81	5,35
MALUKU	4,40	5,22	3,37	4,75	3,62
MALUKU UTARA	4,41	4,64	4,09	3,28	3,94
PAPUA BARAT	0,91	0,93	4,60	2,77	1,51
PAPUA	-6,19	-0,28	6,45	1,84	5,97

## Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Provinsi	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust
ACEH	8,62	9,00	7,94	9,06	8,34	10,12	6,75	9,02	7,73	9,93	8,13	7,57
SUMATERA UTARA	7,47	8,18	6,43	6,28	6,09	6,45	5,95	6,23	6,39	6,71	6,49	5,84
SUMATERA BARAT	7,51	8,02	6,49	6,65	6,39	7,02	6,32	6,50	5,99	6,89	5,81	5,09
RIAU	7,51	6,09	5,29	4,37	4,19	5,48	4,99	6,56	6,72	7,83	5,94	7,43
JAMBI	3,98	4,63	3,69	3,20	2,89	4,76	2,50	5,08	2,73	4,34	4,66	4,00
SUMATERA SELATAN	6,29	6,60	5,60	5,66	5,41	4,84	3,84	4,96	5,03	6,07	3,94	4,31
BENGKULU	3,46	3,46	2,18	3,62	2,10	4,61	1,62	3,47	3,21	4,91	3,84	3,30
LAMPUNG	5,52	6,38	5,21	5,20	5,07	5,69	5,08	4,79	3,44	5,14	4,54	4,62
KEP. BANGKA BELITUNG	3,31	3,86	2,82	3,43	3,22	3,65	2,67	5,14	3,35	6,29	6,17	2,60
KEP. RIAU	7,20	5,38	5,71	5,08	6,05	5,63	5,26	6,69	9,05	6,20	9,03	7,69
DKI JAKARTA	10,86	11,69	10,60	9,67	9,64	8,63	9,84	8,47	8,36	7,23	5,77	6,12
JAWA BARAT	10,01	9,96	9,84	9,08	8,88	9,16	8,66	8,45	8,40	8,72	8,57	8,89
JAWA TENGAH	6,18	7,07	5,90	5,61	5,53	6,01	5,45	5,68	5,31	4,99	4,20	4,63
DI YOGYAKARTA	5,54	4,39	3,98	3,90	3,75	3,24	2,16	3,33	4,07	4,07	2,81	2,72
JAWA TIMUR	4,24	5,38	4,16	4,11	3,97	4,30	4,02	4,19	4,31	4,47	4,14	4,21
BANTEN	13,62	13,74	10,68	9,94	9,77	9,54	9,87	9,07	8,58	9,55	7,95	8,92
BALI	3,00	2,95	2,23	2,10	1,93	1,83	1,37	1,90	1,37	1,99	2,12	1,89
NUSA TENGGARA BARAT	5,46	5,25	5,23	5,23	5,28	5,30	5,30	5,75	4,98	5,69	3,66	3,94
NUSA TENGGARA TIMUR	2,76	3,11	2,53	3,04	2,12	3,25	1,97	3,26	3,12	3,83	3,59	3,25
KALIMANTAN BARAT	5,23	4,60	3,42	3,54	3,13	3,99	2,53	4,04	4,78	5,15	4,58	4,23
KALIMANTAN TENGAH	3,83	3,54	2,73	3,14	1,81	3,00	2,71	3,24	3,14	4,54	3,67	4,82
KALIMANTAN SELATAN	5,74	6,29	4,34	5,19	3,88	3,66	4,03	3,80	4,83	4,92	3,63	5,45
KALIMANTAN TIMUR	10,90	11,43	9,48	9,02	8,94	7,95	8,89	7,38	7,17	7,50	8,86	7,95
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	5,79	5,68	3,92	5,23
SULAWESI UTARA	9,74	10,10	8,55	7,98	7,50	6,79	7,27	7,54	8,69	9,03	7,82	6,18
SULAWESI TENGAH	4,31	6,78	3,75	3,95	2,67	4,19	2,92	3,68	2,99	4,10	3,46	3,29
SULAWESI SELATAN	6,89	8,13	6,56	6,01	5,88	5,10	5,79	5,08	5,81	5,95	5,11	4,80
SULAWESI TENGGARA	4,45	4,69	3,20	4,14	3,43	4,38	2,13	4,43	3,62	5,55	3,78	2,72
GORONTALO	4,95	6,74	4,92	4,47	4,51	4,15	2,44	4,18	3,06	4,65	3,88	2,76
SULAWESI BARAT	2,77	3,35	2,10	2,16	2,02	2,35	1,60	2,08	1,81	3,35	2,72	3,33
MALUKU	8,18	10,81	7,59	7,71	6,97	9,91	6,59	10,51	6,72	9,93	6,98	7,05
MALUKU UTARA	5,80	5,34	5,50	4,82	5,50	3,80	5,65	5,29	5,56	6,05	3,43	4,01
PAPUA BARAT	6,82	6,73	6,57	5,42	4,36	4,40	3,70	5,02	4,61	8,08	5,73	7,46
PAPUA	3,84	5,02	3,03	3,71	2,91	3,15	3,48	3,44	3,72	3,99	2,97	3,35
<b>INDONESIA</b>	<b>6,96</b>	<b>7,48</b>	<b>6,37</b>	<b>6,13</b>	<b>5,88</b>	<b>6,17</b>	<b>5,70</b>	<b>5,94</b>	<b>5,81</b>	<b>6,18</b>	<b>5,50</b>	<b>5,61</b>

# KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

## Perkembangan Tingkat Kesenjangan

Provinsi	Gini Rasio					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	0,33	0,32	0,34	0,32	0,33	0,33
SUMATERA UTARA	0,35	0,33	0,35	0,32	0,34	0,32
SUMATERA BARAT	0,35	0,36	0,36	0,33	0,34	0,33
RIAU	0,36	0,40	0,37	0,35	0,36	0,35
JAMBI	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36	0,35
SUMATERA SELATAN	0,34	0,40	0,38	0,40	0,36	0,35
BENGKULU	0,36	0,35	0,39	0,36	0,38	0,36
LAMPUNG	0,37	0,36	0,36	0,35	0,38	0,36
KEP. BANGKA BELITUNG	0,30	0,29	0,31	0,30	0,28	0,28
KEP. RIAU	0,32	0,35	0,36	0,40	0,36	0,35
DKI JAKARTA	0,44	0,42	0,43	0,43	0,43	0,41
JAWA BARAT	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
JAWA TENGAH	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37
DI YOGYAKARTA	0,40	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42
JAWA TIMUR	0,37	0,36	0,36	0,37	0,42	0,40
BANTEN	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39
BALI	0,41	0,43	0,40	0,42	0,38	0,37
NUSA TENGGARA BARAT	0,36	0,35	0,36	0,38	0,37	0,36
NUSA TENGGARA TIMUR	0,36	0,36	0,35	0,36	0,34	0,34
KALIMANTAN BARAT	0,40	0,38	0,40	0,39	0,33	0,34
KALIMANTAN TENGAH	0,34	0,33	0,35	0,35	0,33	0,33
KALIMANTAN SELATAN	0,37	0,38	0,36	0,36	0,35	0,33
KALIMANTAN TIMUR	0,38	0,36	0,37	0,35	0,32	0,32
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	0,29	0,30
SULAWESI UTARA	0,39	0,43	0,42	0,42	0,37	0,39
SULAWESI TENGAH	0,38	0,40	0,41	0,37	0,37	0,36
SULAWESI SELATAN	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42	0,43
SULAWESI TENGGARA	0,41	0,40	0,43	0,41	0,40	0,40
GORONTALO	0,46	0,44	0,44	0,41	0,42	0,42
SULAWESI BARAT	0,34	0,31	0,35	0,35	0,36	0,36
MALUKU	0,41	0,38	0,37	0,35	0,34	0,35
MALUKU UTARA	0,33	0,34	0,32	0,32	0,28	0,29
PAPUA BARAT	0,40	0,43	0,43	0,44	0,44	0,37
PAPUA	0,42	0,44	0,44	0,41	0,42	0,39
<b>INDONESIA</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>

## Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%)

Provinsi	2013			2014			2015			2016		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
ACEH	11,55	20,14	17,72	11,36	19,19	16,98	10,92	19,56	17,11	10,79	18,80	16,43
SUMATERA UTARA	10,45	10,33	10,39	9,81	9,89	9,85	10,51	11,06	10,79	9,69	10,86	10,27
SUMATERA BARAT	6,38	8,3	7,56	5,41	7,84	6,89	5,73	7,35	6,71	5,52	8,27	7,14
RIAU	6,68	9,55	8,42	6,53	8,93	7,99	7,05	9,95	8,82	6,38	8,51	7,67
JAMBI	10,41	7,54	8,42	10,67	7,39	8,39	12,11	7,82	9,12	10,73	7,30	8,37
SUMATERA SELATAN	13,28	14,5	14,06	12,96	13,99	13,62	12,51	14,47	13,77	12,73	13,77	13,39
BENGKULU	17,29	17,97	17,75	17,19	17,04	17,09	18,15	16,71	17,16	16,16	17,43	17,03
LAMPUNG	10,89	15,62	14,39	10,68	15,46	14,21	9,25	15,05	13,53	10,15	15,24	13,86
KEP. BANGKA BELITUNG	3,47	6,97	5,25	3,04	6,84	4,97	2,77	6,83	4,83	2,67	7,57	5,04
KEP. RIAU	5,79	9,21	6,35	5,61	10,54	6,4	5	9,75	5,78	4,99	10,47	5,84
DKI JAKARTA	3,72	-	3,72	4,09	-	4,09	3,61	-	3,61	3,75	0,00	3,75
JAWA BARAT	8,69	11,42	9,61	8,32	10,88	9,18	8,58	11,61	9,57	7,55	11,72	8,77
JAWA TENGAH	12,53	16,05	14,44	11,5	15,35	13,58	11,5	14,86	13,32	11,38	14,88	13,19
DI YOGYAKARTA	13,73	17,62	15,03	13,36	16,88	14,55	11,93	15,62	13,16	11,68	16,27	13,10
JAWA TIMUR	8,9	16,23	12,73	8,3	15,92	12,28	8,41	15,84	12,28	7,91	15,83	11,85
BANTEN	5,27	7,22	5,89	4,74	7,18	5,51	5,11	7,12	5,75	4,49	7,32	5,36
BALI	4,17	5	4,49	4,35	5,39	4,76	4,52	6,42	5,25	3,53	5,21	4,15
NUSA TENGGARA BARAT	18,69	16,22	17,25	19,17	15,52	17,05	18,4	15,18	16,54	17,55	14,82	16,02
NUSA TENGGARA TIMUR	10,1	22,69	20,24	10,68	21,78	19,6	9,41	25,89	22,58	10,17	25,19	22,01
KALIMANTAN BARAT	5,68	10,07	8,74	5,47	9,2	8,07	6	9,51	8,44	4,97	9,38	8,00
KALIMANTAN TENGAH	5,8	6,45	6,23	4,75	6,74	6,07	5,68	6,02	5,91	4,49	5,83	5,36
KALIMANTAN SELATAN	3,75	5,5	4,76	3,68	5,64	4,81	4,27	5,06	4,72	3,43	5,37	4,52
KALIMANTAN TIMUR	3,99	10,24	6,38	3,98	10,06	6,31	3,73	10,13	6,10	3,86	10,15	6,0
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	3,68	9,67	6,32	4,50	10,29	6,99
SULAWESI UTARA	6,12	10,46	8,5	5,57	10,47	8,26	5,26	12,10	8,98	5,22	10,82	8,20
SULAWESI TENGAH	9,45	15,89	14,32	10,35	14,66	13,61	11,06	15,07	14,07	10,07	15,48	14,09
SULAWESI SELATAN	5,23	13,31	10,32	4,93	12,25	9,54	4,93	13,22	10,12	4,47	12,30	9,24
SULAWESI TENGGARA	5,52	16,92	13,73	6,62	15,17	12,77	7,84	16,12	13,74	6,87	15,31	12,77
GORONTALO	6,00	24,22	18,01	6,24	23,21	17,41	6,84	24,17	18,16	5,78	24,3	17,63
SULAWESI BARAT	8,57	13,31	12,23	9,99	12,67	12,05	8,69	12,70	11,9	8,43	12,00	11,19
MALUKU	7,96	26,3	19,27	7,35	25,49	18,44	7,83	26,70	19,36	7,86	26,88	19,26
MALUKU UTARA	3,56	9,20	7,64	3,58	8,85	7,41	2,61	7,57	6,22	3,76	7,43	6,41
PAPUA BARAT	4,89	36,89	27,14	5,52	35,01	26,26	5,68	37,94	25,73	5,69	37,33	24,88
PAPUA	5,22	40,72	31,53	4,46	35,87	27,8	3,61	37,34	28,4	4,21	37,07	28,40
<b>INDONESIA</b>	<b>8,52</b>	<b>14,42</b>	<b>11,47</b>	<b>8,16</b>	<b>13,76</b>	<b>10,96</b>	<b>8,22</b>	<b>14,09</b>	<b>11,13</b>	<b>7,73</b>	<b>13,96</b>	<b>10,7</b>

# IPM DAN KESENJANGAN

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	67,09	67,45	67,81	68,3	68,81	69,45
SUMATERA UTARA	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51
SUMATERA BARAT	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98
RIAU	68,65	68,9	69,15	69,91	70,33	70,84
JAMBI	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89
SUMATERA SELATAN	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46
BENGKULU	65,35	65,96	66,61	67,5	68,06	68,59
LAMPUNG	63,71	64,2	64,87	65,73	66,42	66,95
KEP. BANGKA BELITUNG	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05
KEP. RIAU	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75
DKI JAKARTA	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99
JAWA BARAT	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
JAWA TENGAH	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
DI YOGYAKARTA	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59
JAWA TIMUR	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95
BANTEN	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27
BALI	70,1	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27
NUSA TENGGARA BARAT	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19
NUSA TENGGARA TIMUR	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67
KALIMANTAN BARAT	61,97	62,35	63,41	64,3	64,89	65,59
KALIMANTAN TENGAH	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
KALIMANTAN SELATAN	65,2	65,89	66,68	67,17	67,63	68,38
KALIMANTAN TIMUR	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	67,99	68,64	68,76
SULAWESI UTARA	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39
SULAWESI TENGAH	63,29	64,27	65	65,79	66,43	66,76
SULAWESI SELATAN	66	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15
SULAWESI TENGGARA	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07	68,75
GORONTALO	62,65	63,48	64,16	64,7	65,17	65,86
SULAWESI BARAT	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96
MALUKU	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05
MALUKU UTARA	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91
PAPUA BARAT	59,6	59,9	60,3	60,91	61,28	61,73
PAPUA	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25
INDONESIA	66,53	67,09	67,7	68,31	68,9	69,55

Provinsi	Gini Rasio											
	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
ACEH	0,30	0,27	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32	0,34	0,32	0,33	0,33	
SUMATERA UTARA	0,33	0,31	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	0,35	0,32	0,34	0,32	
SUMATERA BARAT	0,30	0,31	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36	0,36	0,33	0,34	0,33	
RIAU	0,28	0,32	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40	0,37	0,35	0,36	0,35	
JAMBI	0,31	0,31	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36	0,35	
SUMATERA SELATAN	0,31	0,32	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40	0,38	0,40	0,36	0,35	
BENGKULU	0,35	0,34	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35	0,39	0,36	0,38	0,36	
LAMPUNG	0,38	0,39	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,38	0,36	
KEP. BANGKA BELITUNG	0,28	0,26	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29	0,31	0,30	0,28	0,28	
KEP. RIAU	0,27	0,30	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35	0,36	0,40	0,36	0,35	
DKI JAKARTA	0,27	0,34	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42	0,43	0,43	0,43	0,41	
JAWA BARAT	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	
JAWA TENGAH	0,31	0,33	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	
DI YOGYAKARTA	0,42	0,37	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42	
JAWA TIMUR	0,36	0,34	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36	0,36	0,37	0,42	0,40	
BANTEN	0,36	0,37	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	
BALI	0,33	0,33	0,30	0,31	0,37	0,41				0,38	0,37	
NUSA TENGGARA BARAT	0,32	0,33	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35	0,36	0,38	0,37	0,36	
NUSA TENGGARA TIMUR	0,35	0,35	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36	0,35	0,36	0,34	0,34	
KALIMANTAN BARAT	0,31	0,31	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38	0,40	0,39	0,33	0,34	
KALIMANTAN TENGAH	0,28	0,30	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33	0,35	0,35	0,33	0,33	
KALIMANTAN SELATAN	0,28	0,34	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38	0,36	0,36	0,35	0,33	
KALIMANTAN TIMUR	0,32	0,33	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36	0,37	0,35	0,32	0,32	
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,30	
SULAWESI UTARA	0,32	0,32	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43	0,42	0,42	0,37	0,39	
SULAWESI TENGAH	0,30	0,32	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40	0,41	0,37	0,37	0,36	
SULAWESI SELATAN	0,35	0,37	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42	0,43	
SULAWESI TENGGARA	0,36	0,35	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40	0,43	0,41	0,40	0,40	
GORONTALO	0,36	0,39	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44	0,44	0,41	0,42	0,42	
SULAWESI BARAT	-	0,31	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31	0,35	0,35	0,36	0,36	
MALUKU	0,26	0,33	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38	0,37	0,35	0,34	0,35	
MALUKU UTARA	0,26	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,32	0,32	0,28	0,29	
PAPUA BARAT	-	0,30	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43	0,43	0,44	0,44	0,37	
PAPUA	0,39	0,41	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44	0,44	0,41	0,42	0,39	
INDONESIA	0,36	0,36	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	

# KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangka	5,37	6,91	5,35	5,3	4,81	4,54	4,62
Belitung	5,53	5,93	6,09	5,96	4,72	4,53	4,81
Bangka Barat	4,37	5,51	5,49	5,09	4,72	4,79	4,61
Bangka Tengah	4,61	6,01	5,02	3,3	1,5	0,31	2,97
Bangka Selatan	5,97	6,42	4,7	4,45	4,44	4,07	4,19
Belitung Timur	4,43	6,12	6,05	5,7	5,17	4,39	4,19
Pangkalpinang	6,07	6,79	6,11	5,78	4,27	4,24	5,17

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangka	6,47	3,15	2,77	4,26	8,36	8,87	6,47
Belitung	3,77	2,97	1,76	2,59	3,03	4,57	3,77
Bangka Barat	4,19	3,64	3,79	3,91	1,21	5,92	4,19
Bangka Tengah	6,65	3,21	4,54	3,47	5,64	6,58	6,65
Bangka Selatan	4,07	3,92	3,83	1,64	3,26	2,01	4,07
Belitung Timur	3,98	2,51	2,42	2,20	2,61	2,55	3,98
Pangkalpinang	9,37	5,63	5,25	6,66	8,84	10,64	9,37

Kab/Kota	Distribusi PDRB (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangka	18,42	18,72	18,43	18,21	18,25	18,31	18,20
Belitung	11,65	11,69	11,81	11,95	12,07	12,18	12,35
Bangka Barat	19,17	18,93	18,88	19,00	19,17	19,06	18,92
Bangka Tengah	12,66	12,60	12,61	12,35	12,00	11,73	11,53
Bangka Selatan	11,72	11,75	11,69	11,60	11,55	11,53	11,62
Belitung Timur	10,07	9,97	10,06	10,13	10,17	10,18	10,20
Pangkalpinang	16,31	16,34	16,52	16,76	16,79	17,01	17,18

Kab/Kota	Tingkat Kemiskinan (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangka	6,51	5,16	5,37	5,25	4,97	5,4	5,22
Belitung	7,81	5,36	5,57	5,4	5,2	5,63	5,52
Bangka Barat	10,1	6,97	7,26	8,48	7,36	8,38	7,85
Bangka Tengah	5,25	3,59	3,72	3,26	3,15	3,08	2,74
Bangka Selatan	8,07	5,56	5,77	5,46	5,27	5,67	5,64
Belitung Timur	6,19	4,23	4,4	4,01	3,87	3,74	3,62
Pangkalpinang	10,4	7,13	7,43	6,9	6,68	7,33	6,99

**TANTANGAN: PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA, PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN**

# STATUS DESA MENURUT WILAYAH PULAU

**TOTAL : 74.093 Desa**  
**Tertinggal : 20.175 (27,23%)**  
**Berkembang : 51.014 (68,85%)**  
**Mandiri : 2.904 (3,92%)**

**KALIMANTAN : 6.486 (8,75%)**  
 Tertinggal : 2.452 (3,31%)  
 Berkembang : 3.960 (5,34%)  
 Mandiri : 74 (0,10%)

**SULAWESI : 8.635 (11,65%)**  
 Tertinggal : 2.063 (2,78%)  
 Berkembang : 6.506 (8,78%)  
 Mandiri : 66 (0,09%)

**PAPUA : 6.746 (9,10%)**  
 Tertinggal : 6.139 (8,29%)  
 Berkembang : 601 (0,81%)  
 Mandiri : 6 (0,01%)

**SUMATERA : 22.910 (30,82%)**  
 Tertinggal : 5.982 (8,07%)  
 Berkembang : 16.476 (22,24%)  
 Mandiri : 452 (0,61%)

**JAWA-BALI : 23.117 (31,20%)**  
 Tertinggal : 591 (0,80%)  
 Berkembang : 20.282 (27,37%)  
 Mandiri : 2.244 (3,03%)

**NUSA TENGGARA: 3.945 (5,32%)**  
 Tertinggal : 1.582 (2,14%)  
 Berkembang : 2.319 (3,13%)  
 Mandiri : 44 (0,06%)

**MALUKU : 2.254 (3,04%)**  
 Tertinggal: 1.366 (1,84%)  
 Berkembang: 870 (1,17%)  
 Mandiri : 18 (0,02%)

**Desa Tertinggal**

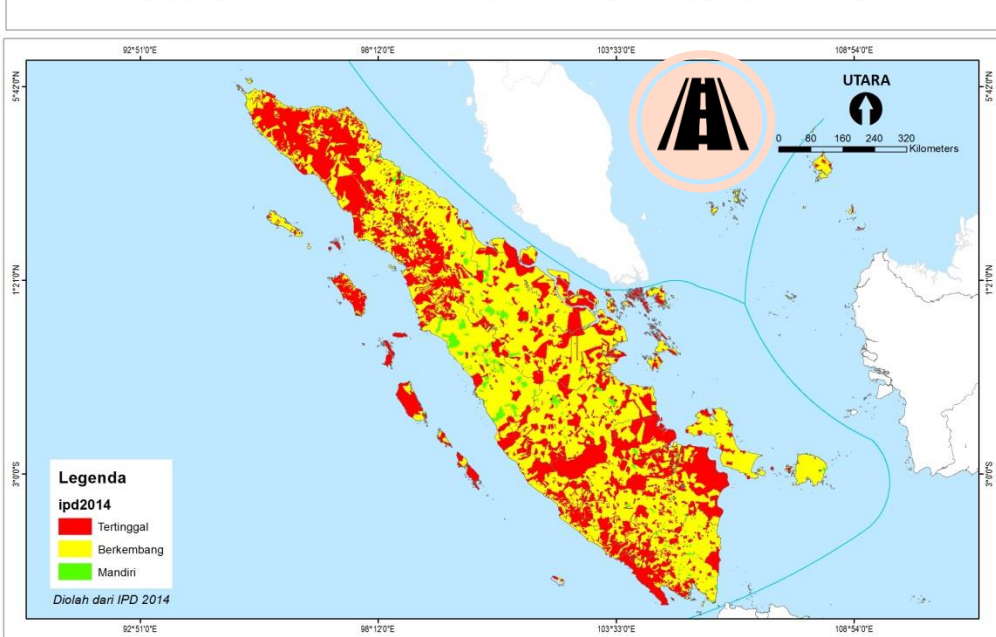
**Desa Berkembang**

**Desa Mandiri**

**Jumlah Desa 74.754**  
**(Permendagri No. 56/2015)**

# FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SUMATERA

PETA SEBARAN KONDISI DESA PULAU SUMATERA TAHUN 2014



Penyebab ketertinggalan di Sumatera:

- Prasarana dan Sarana Dasar
- Aksesibilitas
- Ekonomi



- Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di **PULAU-PULAU KECIL** dan **PEGUNUNGAN** yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan darat sehingga mengakibatkan tingginya **HARGA PANGAN** dan **BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA)**.
- Terbatasnya akses **AIR BERSIH, LISTRIK** dan **TELEKOMUNIKASI**

- Rendahnya **PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH** dan **PENDAPATAN** karena terbatasnya **PENGETAHUAN** dan **KETERAMPILAN TEKNOLOGI**, kurangnya **TENAGA PENYULUH** dan **PENDAMPING**, rendahnya **PENGOLAHAN** produk, dan terbatasnya akses **PASAR**.
- Kurangnya **MANFAAT** Perkebunan dan Pertambangan bagi masyarakat desa.



- Rendahnya angka **MELEK HURUF** dan **PARTISIPASI** pendidikan, terutama di **PULAU-PULAU KECIL** dan **PEGUNUNGAN**
- Terbatasnya dan kurang meratanya **DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN** dan **KESEHATAN**
- Terbatasnya **AKSES** menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan



- Sering terjadinya **BENCANA ALAM** gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat



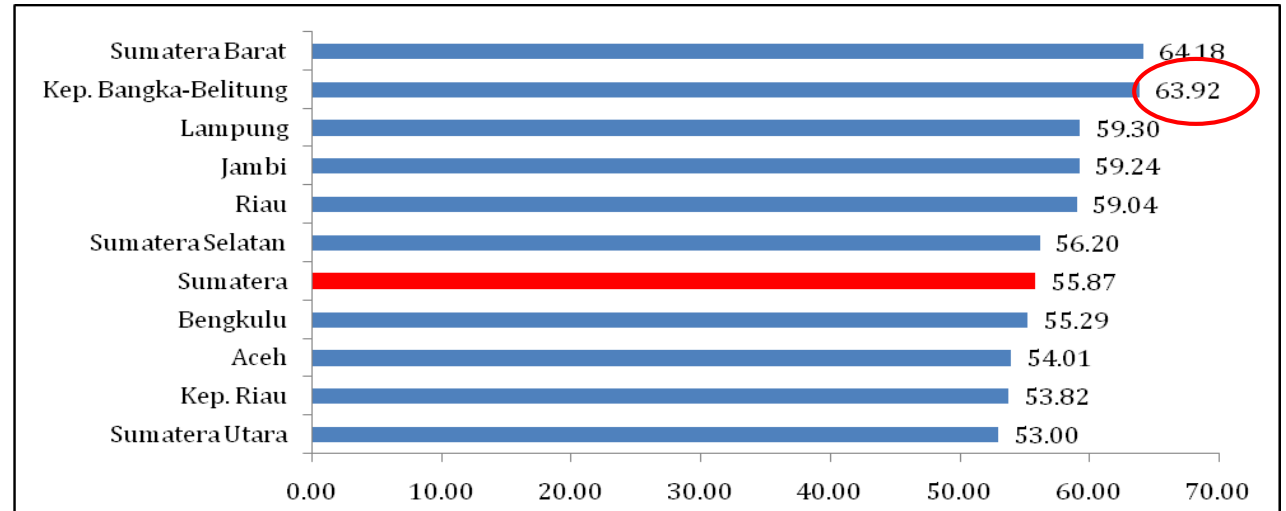
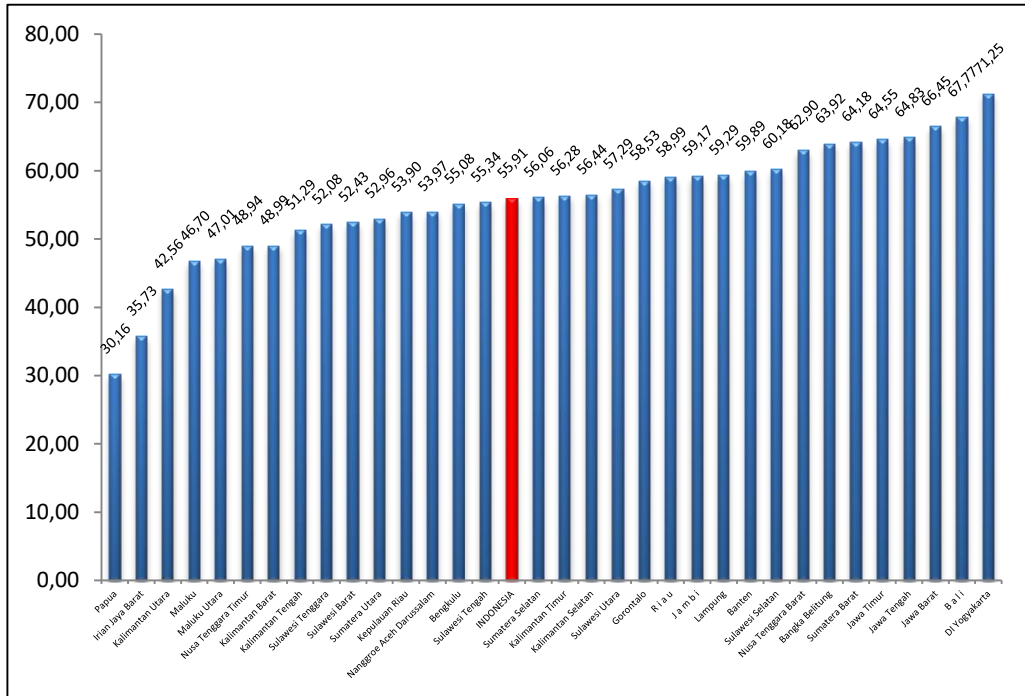
Indikator	Baseline	Target 2019
jumlah desa tertinggal ke berkembang	5.982	2.119
jumlah desa berkembang ke mandiri	16.476	416

## Isu Strategis

1. **Dana Desa:** Belum optimalnya manfaat dana desa karena rendahnya kualitas belanja.
2. **Pendampingan:** Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa/nagari.
3. **Prasarana:** Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi.
4. **Ekonomi:** Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.

# STATUS PERKEMBANGAN DESA

Indeks Pembangunan Desa 2014 Berdasarkan Provinsi Indonesia



Sumber: Indeks Pembangunan Desa, 2014

Keterangan : Nilai Indeks <50 adalah desa tertinggal

Nilai Indeks <= 50 <= 75 adalah desa berkembang

Nilai Indeks >75 adalah desa mandiri.

Nama Provinsi	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Aceh	54,01	57,12	42,18	70,42	46,73	48,66	30,85	67,82	1,33	6.474
Sumatera Utara	53,00	54,34	38,15	74,58	46,01	49,97	37,15	61,22	1,63	5.389
Sumatera Barat	64,18	69,36	46,51	77,70	58,41	70,11	6,36	83,98	9,66	880
Riau	59,04	61,36	42,53	71,92	61,52	63,78	17,65	79,84	2,51	1.592
Jambi	59,24	61,12	40,39	76,70	60,10	63,67	13,66	84,12	2,22	1.398
Sumatera Selatan	56,20	53,89	40,34	77,54	57,20	58,92	23,29	75,75	0,96	2.817
Bengkulu	55,29	57,87	38,52	74,44	50,80	55,07	25,65	73,97	0,38	1.341
Lampung	59,30	62,22	42,92	73,58	59,14	61,94	14,29	82,55	3,16	2.435
Kepulauan Bangka Belitung	63,92	60,96	50,09	85,06	63,39	65,76	3,88	93,20	2,92	309
Kepulauan Riau	53,82	56,10	40,01	67,01	53,70	54,41	34,55	64,00	1,45	275
Sumatera	55,87	57,70	41,03	73,77	52,00	55,11	26,11	71,92	1,97	22.910

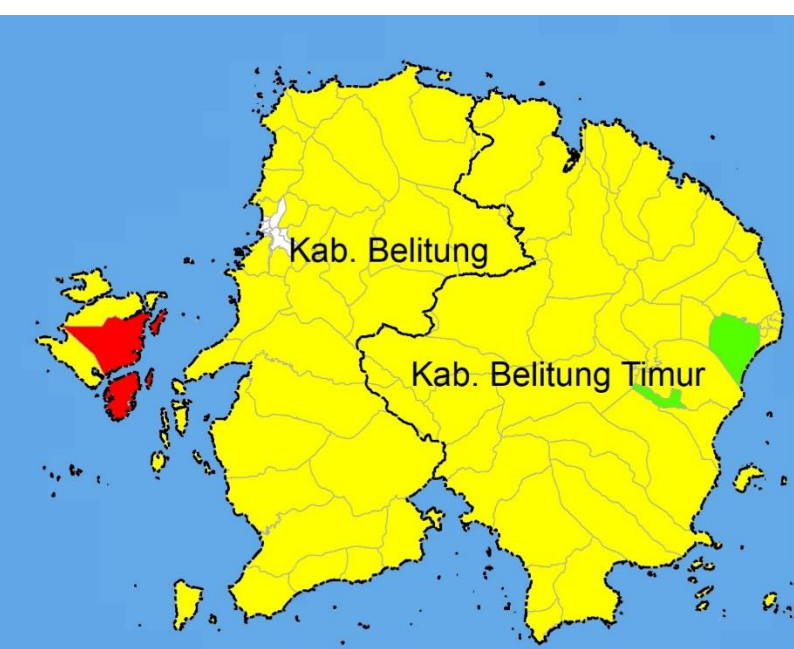
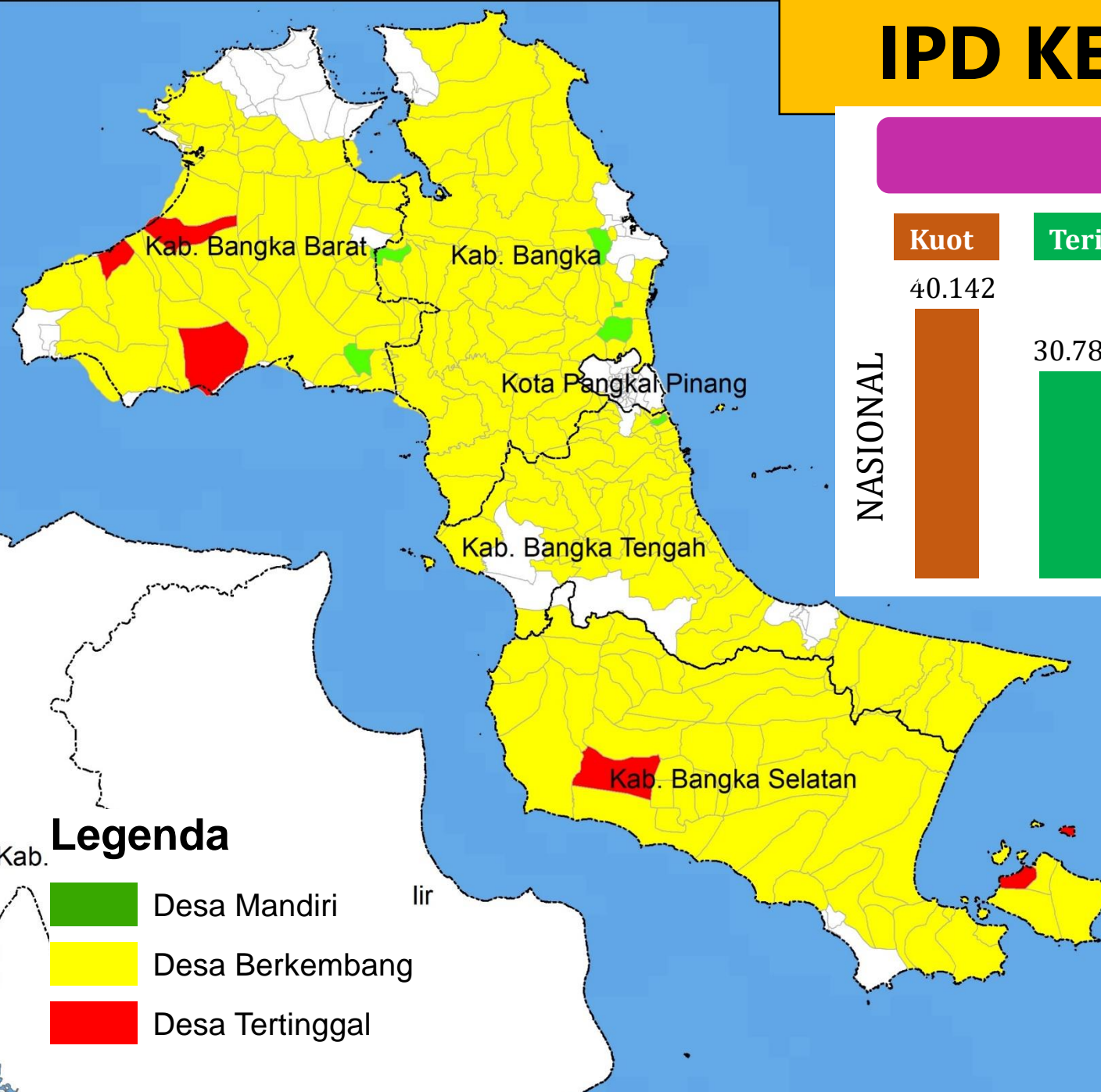
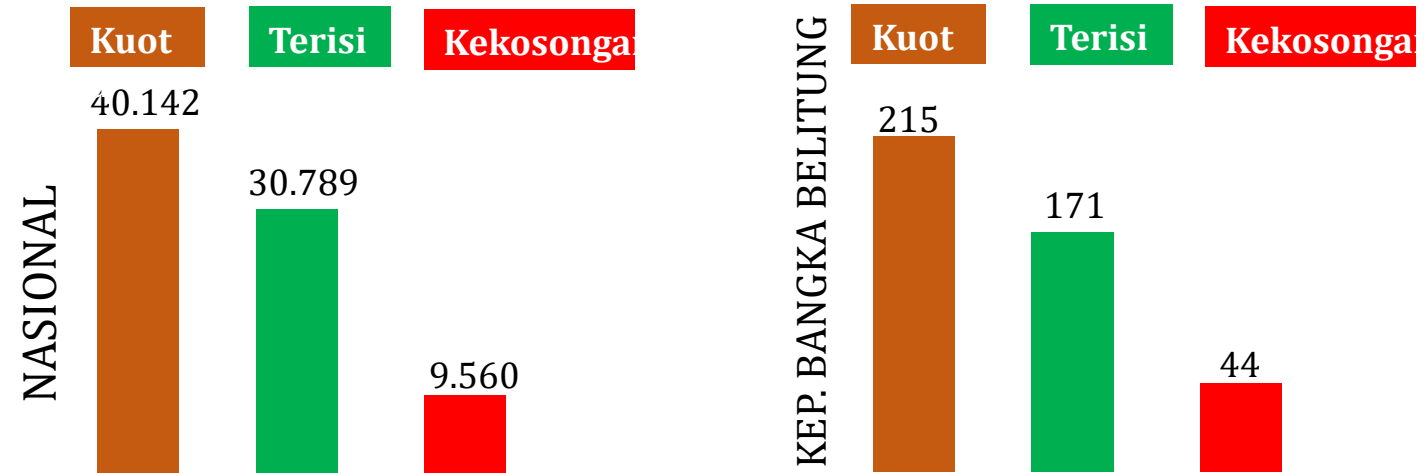
# STATUS DESA PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG (Indeks Pembangunan Desa 2014)

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas / Transportasi	Pelayanan Umum	Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
<b>Bangka</b>	65,50	63,95	48,74	88,39	63,31	68,38	0,00	93,55	6,45	62
<b>Belitung</b>	64,96	65,15	49,95	81,53	62,48	70,63	9,52	90,48	0,00	42
<b>Bangka Barat</b>	62,31	56,44	50,19	84,90	65,44	62,55	5,00	91,67	3,33	60
<b>Bangka Tengah</b>	63,82	60,53	52,16	86,04	61,96	61,02	1,79	96,43	1,79	56
<b>Bangka Selatan</b>	63,10	61,08	46,64	85,57	66,63	61,63	6,00	94,00	0,00	50
<b>Belitung Timur</b>	63,94	59,15	53,70	81,74	59,22	73,41	2,56	92,31	5,13	39
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	63,92	60,96	50,09	85,06	63,39	65,76	3,88	93,20	2,91	309

**Mayoritas Desa Berkembang**

# IPD KEP. BANGKA BELITUNG

DATA PENDAMPING  
2015-2016



# **BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAn**

# JEPANG



# INDONESIA



# JEPANG



# INDONESIA



# JEPANG



# INDONESIA



# JEPANG



# INDONESIA



# JEPANG



# INDONESIA



# JEPANG



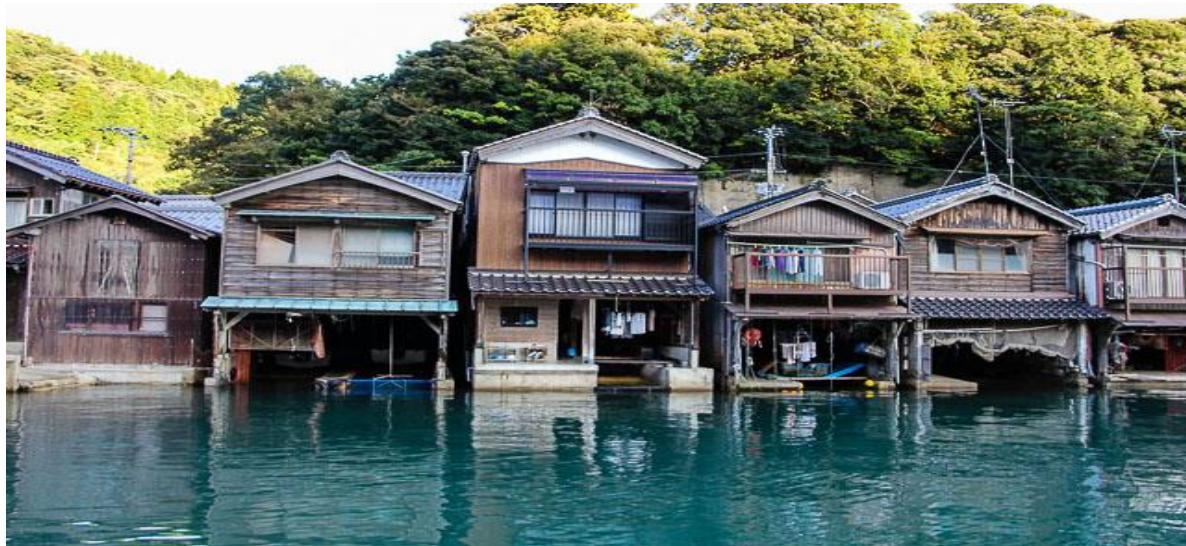
# INDONESIA



AFP/GETTY IMAGES



# JEPANG



# INDONESIA



# **MEMBANGUN KEUNGGULAN DAN DAYA SAING DAERAH**

# TRANSFORMASI KEUNGGULAN

1. Akumulasi Modal Sosial
2. Akumulasi Modal Pengetahuan
3. Akumulasi Modal Fisik
4. Akumulasi Modal Keuangan (Kapital)

**2005**  
*Keunggulan Komparatif*

● **DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT**

- Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan
- Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner

**2020**

*Keunggulan Kompetitif*

● **DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI**

- SDM terampil dan terdidik
- Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi
- Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan
- Jaringan transportasi darat, laut dan udara

**2045**

*Keunggulan Kompetitif*

● **DAYA SAING BERBASIS INOVASI**

- Ekonomi kreatif
- Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan
- Tenaga profesional
- Konektivitas
- Kerjasama: Pemda-Universitas dan Swasta

# TRANSFORMASI DESA

- 1. Akumulasi modal Sosial-Budaya
- 2. Akumulasi modal ekonomi
- 3. Akumulasi modal fisik
- 4. Akumulasi pengetahuan

*Desa Tertinggal*

- 1. Regulasi
- 2. Data dan Sistem Informasi
- 3. Pengetahuan
- 4. Organisasi
- 5. Masyarakat
- 6. Pemdesa
- 7. Prasarana
- 8. Pendampingan

*Desa Berkembang*

- 1. Regulasi
- 2. Data dan Sistem Informasi
- 3. Pengetahuan
- 4. Organisasi
- 5. Masyarakat
- 6. Pemdesa
- 7. Prasarana
- 8. Pendampingan

*Desa Mandiri*

- 1. Regulasi
- 2. Data dan Sistem Informasi
- 3. Pengetahuan
- 4. Organisasi
- 5. Masyarakat
- 6. Pemdesa
- 7. Prasarana
- 8. Pendampingan

**Kota**  
*(Urban-Village)*

**Desa Berkelanjutan**  
*(Village-Urban)*

**Proses**

- Partisipasi
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Fairness
- Responsibilitas

**Tahapan**

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pelaksanaan
- Pemantauan dan pengendalian
- Pelaporan

# PENDEKATAN BERBASIS HAK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI

Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya

## Instrumen (Masukan)

### Pengambilan Keputusan

- Pilkada
- Rapat DPRD
- Musrenbang

### Keuangan Daerah

- Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman) dan Dana Desa
- Pengeluaran
- Investasi

### Administrasi

- Sumber Daya Manusia
- Peralatan
- Peraturan Daerah

## Mekanisme (Proses)

### Jejaring

- DPRD
- Pemda
- Masyarakat Sipil: Ormas, LSM, PT, Media Massa

### Pelayanan Publik

- Pangan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Kesempatan Kerja
- Perumahan
- Air bersih dan sanitasi
- Tanah
- SDA dan Lingkungan
- Rasa aman
- Partisipasi

### Manajemen Organisasi

- Sistem Informasi
- Standar Pelayanan Minimum
- Unit Pengaduan Masalah
- Sistem Reward and Punishment

## Pencapaian (Keluaran)

- Partisipasi
- Keberpihakan
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Efektivitas
- Keadilan

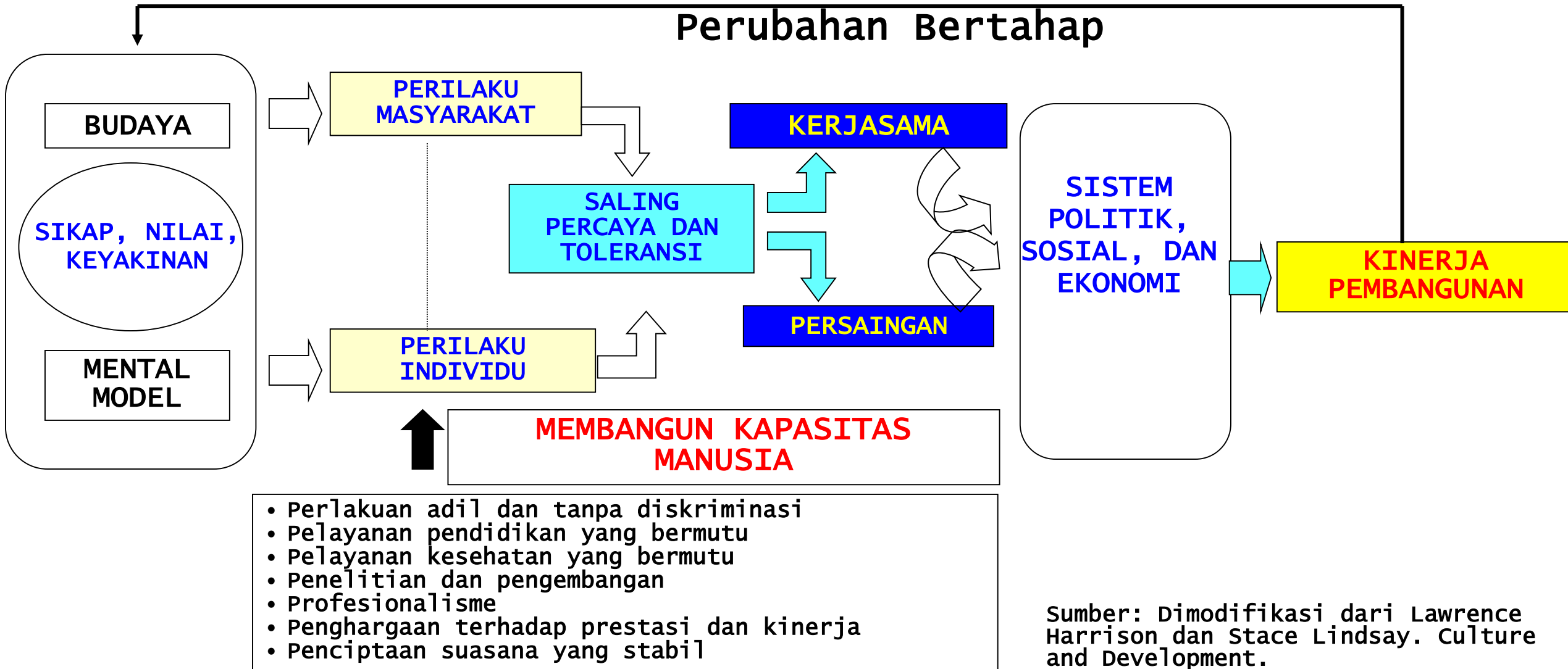
## Kinerja (Manfaat dan Dampak)

Terpenuhinya hak-hak dasar  
Masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera

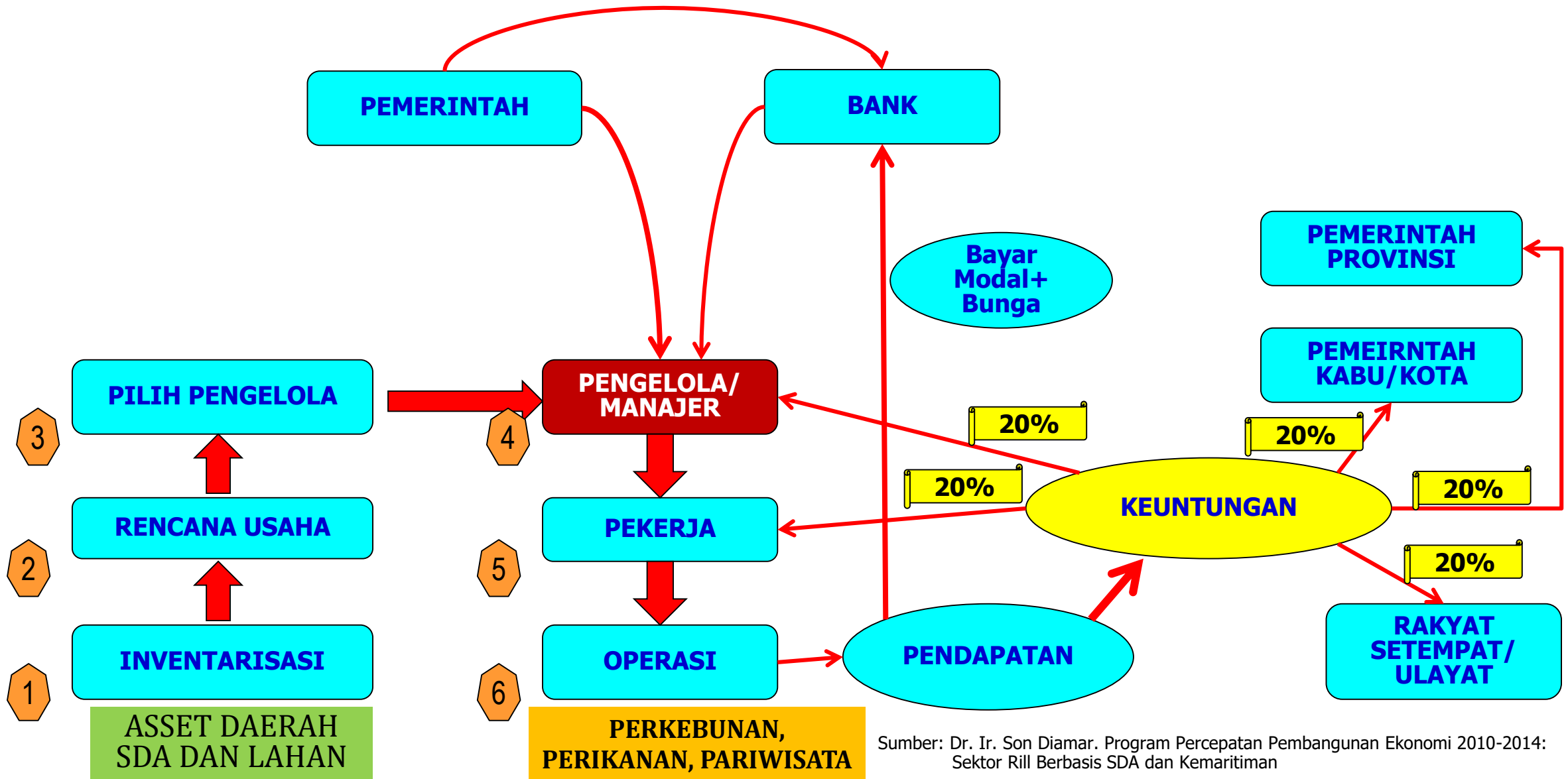
Waktu



# BUDAYA DAN KINERJA PEMBANGUNAN



# MANAJEMEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERKELANJUTAN



Sumber: Dr. Ir. Son Damar. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi 2010-2014: Sektor Rill Berbasis SDA dan Kemaritiman

# **MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

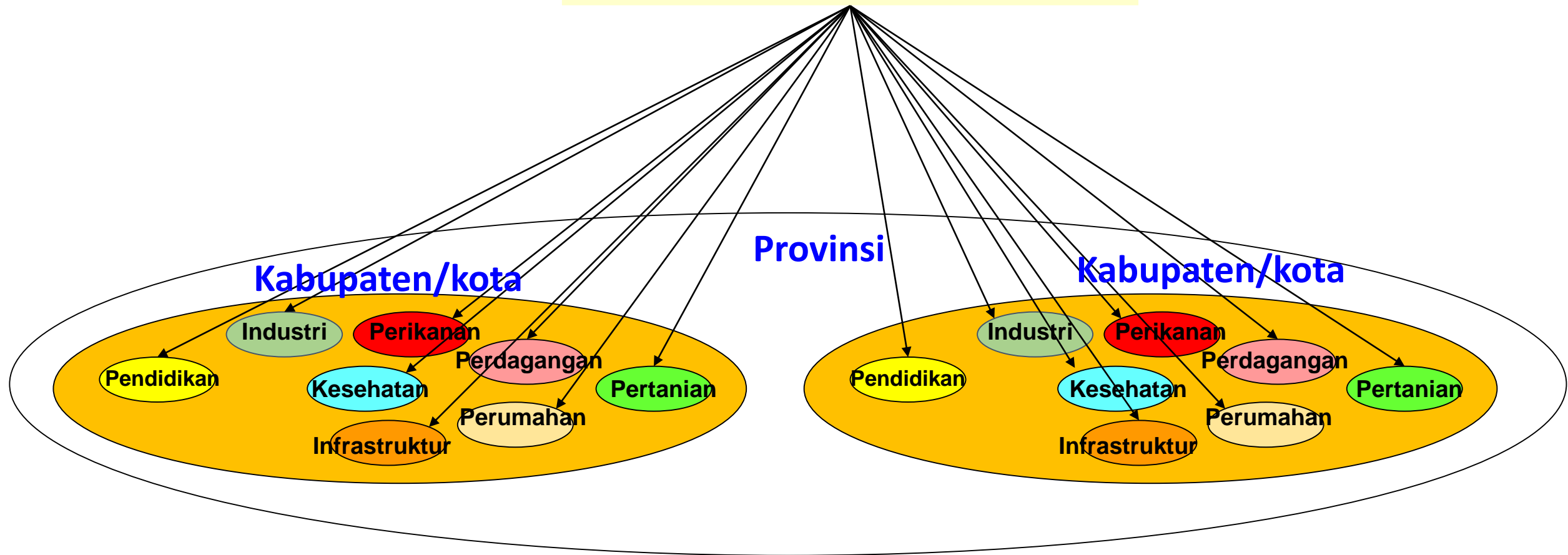


# KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMD



# PERENCANAAN MAKRO

RPJP/RPJPD,  
RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD



**Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah**

***Bagaimana menentukan daerah prioritas?***

**Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor**

***Bagaimana menentukan kegiatan prioritas?***

# FOKUS DAN PRIORITAS

## RPJMN DAN RKP

TUJUAN, STRATEGI  
DAN ARAH  
KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN  
SEKTOR (K/L)

TUJUAN, STRATEGI  
DAN ARAH  
KEBIJAKAN  
PENGEM-BANGAN  
WILAYAH  
PROVINSI

## RPJMD DAN RKPD PROVINSI

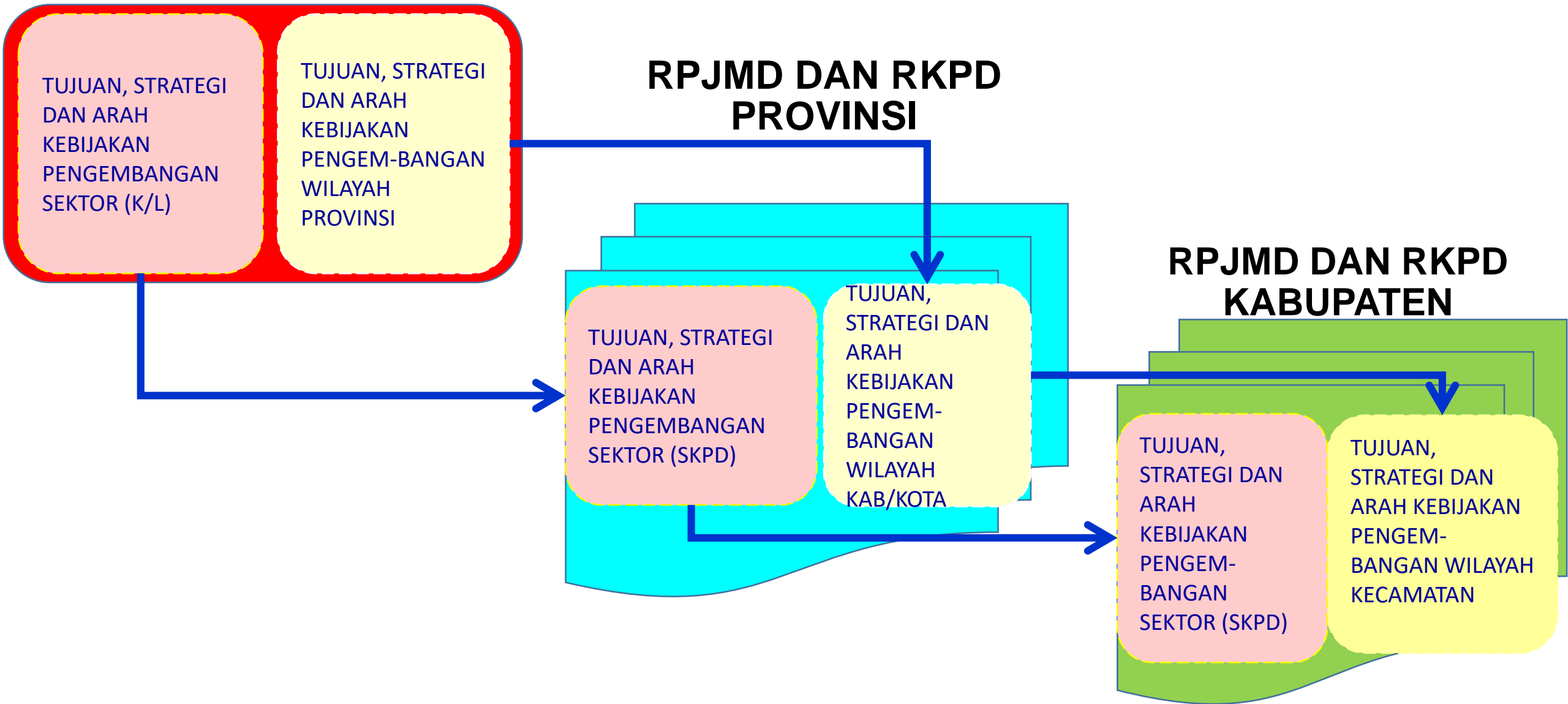
TUJUAN, STRATEGI  
DAN ARAH  
KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN  
SEKTOR (SKPD)

TUJUAN,  
STRATEGI DAN  
ARAH  
KEBIJAKAN  
PENGEM-  
BANGAN  
WILAYAH  
KAB/KOTA

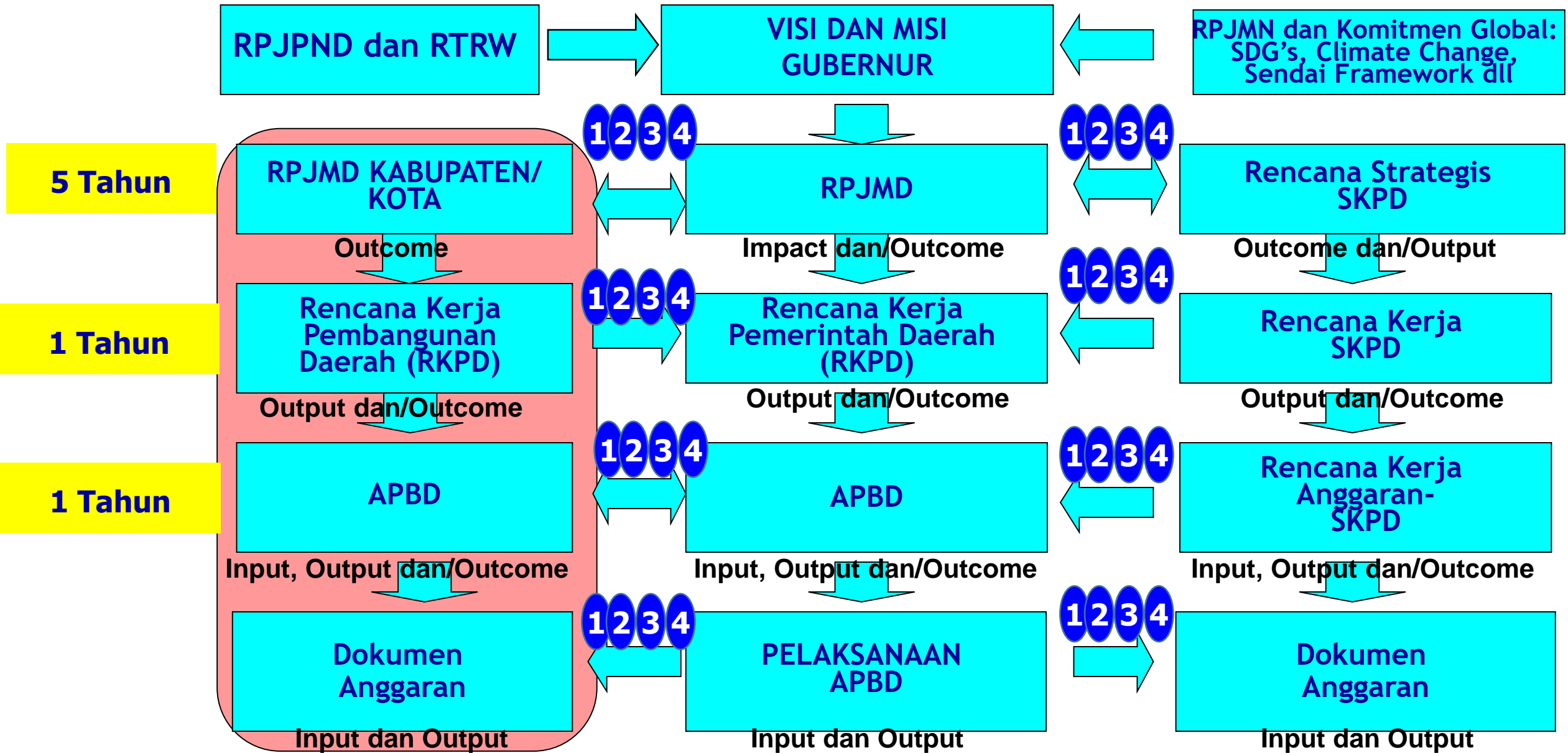
## RPJMD DAN RKPD KABUPATEN

TUJUAN,  
STRATEGI DAN  
ARAH  
KEBIJAKAN  
PENGEM-  
BANGAN  
SEKTOR (SKPD)

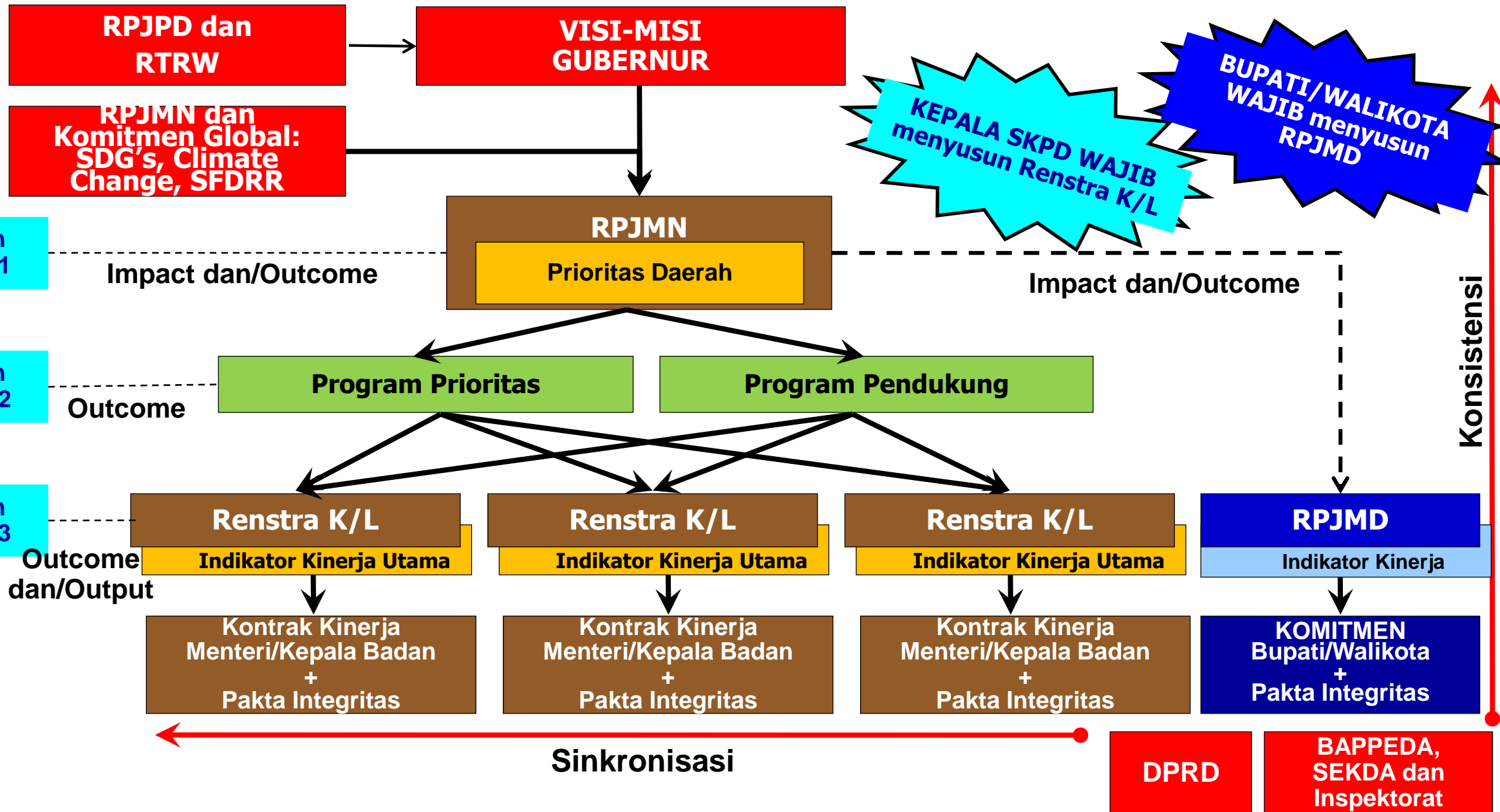
TUJUAN,  
STRATEGI DAN  
ARAH KEBIJAKAN  
PENGEM-  
BANGAN WILAYAH  
KECAMATAN



# HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



# SINKRONISASI DAN KONSISTENSI



Sasaran Tingkat 3

Outcome dan/Output

Sasaran Tingkat 4

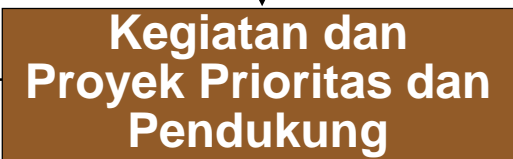
Outcome dan/Output

Sasaran Tingkat 5

Outcome dan Output

Sasaran Tingkat 6

Input dan Output



Sinkronisasi



Konsistensi

**SKENARIO PEMBANGUNAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2017-2022**

# SKENARIO PEMBANGUNAN DAERAH 2017-2022

Skenario pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tiga skenario:

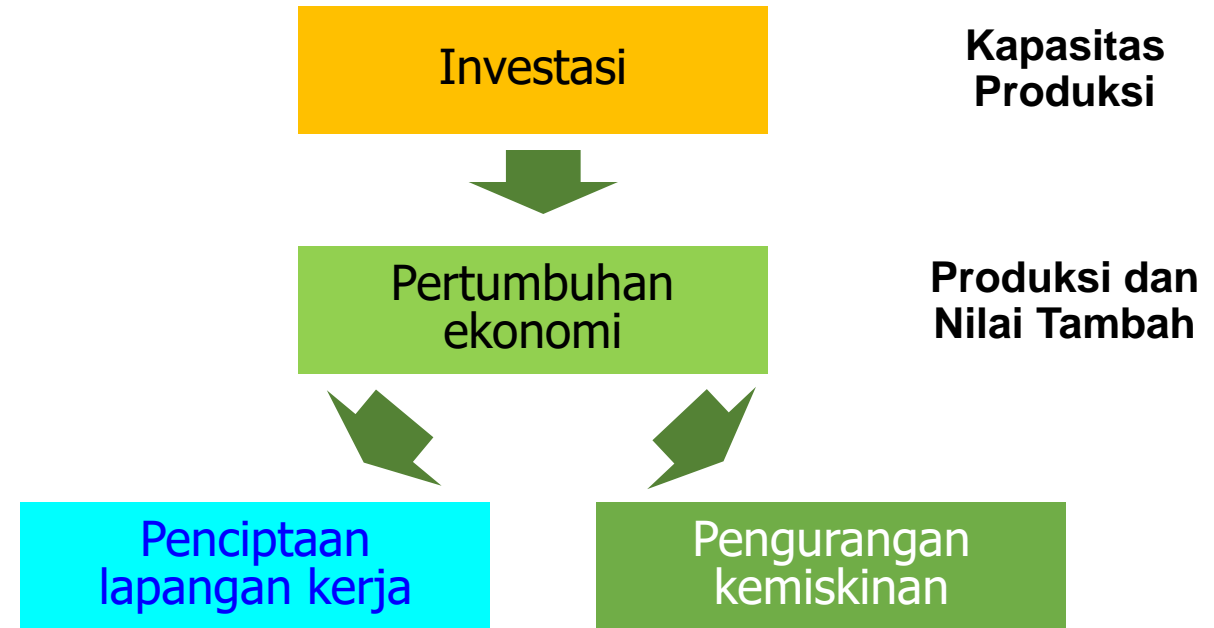
- 1. Skenario Normal (Business as Usual):** Mempertahankan kinerja pembangunan melalui kebijakan dan program pembangunan yang sudah ada;
- 2. Skenario Moderat:** Mendorong (akselerasi) percepatan pembangunan melalui kebijakan dan program percepatan pembangunan
- 3. Skenario Optimis:** Melakukan transformasi (perubahan) dan akselerasi (percepatan) pembangunan melalui pelaksanaan sistem dan manajemen berbasis kinerja, penajaman kebijakan dan program, pengendalian dan evaluasi, pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan investasi.

# TANTANGAN 2017-2022

- 1. Mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan** dengan mengoptimalkan sumberdaya di desa, kecamatan dan kabupaten/kota, membangun **basis keunggulan desa, kecamatan dan kabupaten/kota (*one village/region one product*)**, dan memperkuat **keterkaitan antardesa dan antarkecamatan** untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat; serta mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antarwilayah.
- 2. Melakukan perubahan mendasar (transformasi)** dengan mengoptimalkan **pengelolaan pemerintahan** secara berjenjang dan berbasis kinerja, meningkatkan kinerja (jangkauan dan mutu) **pelayanan publik**, meningkatkan akses masyarakat terhadap **pemenuhan hak-hak dasar**, meningkatkan kuantitas dan kualitas **infrastruktur**, dan membangun **kerjasama dan kemitraan yang solid**.

# RENCANA INVESTASI

- Investasi akan menambah cadangan (stock) modal dan meningkatkan akumulasi kapital;
- Penambahan modal akan meningkatkan kapasitas produksi dan selanjutnya mendorong produksi dan peningkatan nilai tambah;
- Peningkatan produksi dan nilai tambah berarti pertumbuhan ekonomi;
- Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan tambahan tenaga kerja sehingga menurunkan pengangguran;
- Peningkatan produksi berarti peningkatan nilai tambah dan pendapatan, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.



# ASUMSI DASAR PROYEKSI PEREKONOMIAN

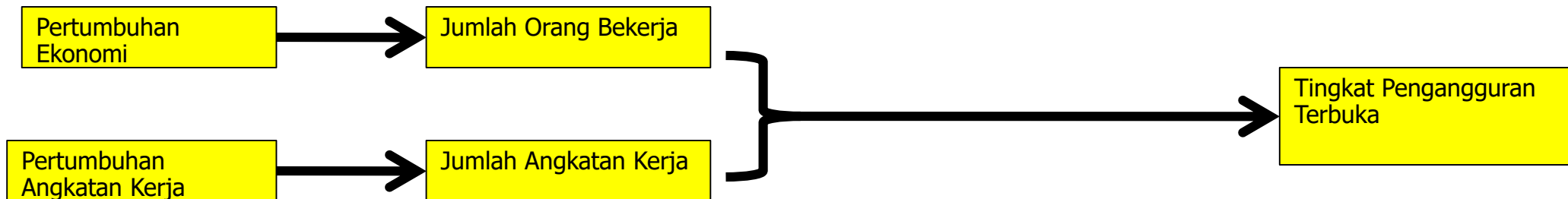
1. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar .... persen pada tahun 2017-2022.
2. Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan sebesar ... persen pada tahun 2017-2022.
3. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar ... per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan sebesar ... persen.
4. Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar ... Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja .... persen.

# EXCERCISE

## PENURUNAN PENGANGGURAN

### SKENARIO OPTIMIS: AKSELERASI (PERCEPATAN) DAN TRANSFORMASI (PERUBAHAN)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertumbuhan ekonomi (target) ( <i>gPDRB</i> )	5,87	6,05	6,24	6,43	6,61	6,79	6,97
2. Elastisitas pertumbuhan thd lap. Kerja ( <i>Egemp</i> )	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
3. Jumlah orang bekerja (ribu org) ( <i>Twork</i> )	172.710	172.762	172.816	172.872	172.929	172.988	173.048
4. Pertumbuhan angkatan kerja (persen) ( <i>gLF</i> )	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5. Jumlah angkatan kerja (ribu orang) ( <i>TLF</i> )	179.655	179.687	179.719	179.752	179.784	179.816	179.848
5. Jumlah penganggur (ribu orang) ( <i>Tune</i> )	6.945	6.925	6.903	6.880	6.855	6.828	6.800
6. Tingkat pengangguran terbuka (persen) ( <i>Roemp</i> )	3,87	3,85	3,84	3,83	3,81	3,80	3,78



$$T_{work} = T_{work(t-1)} * (1 + (gPDRB + Egemp))$$

$$TLF = TLF_{(t-1)} * (1 + gLF)$$

$$T_{une} = TLF - T_{work}$$

$$Roemp = 100\% * T_{une} / TLF$$

# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN

## SKENARIO MODERAT: AKSELERASI (PERCEPATAN)

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87	5,96	6,04	6,13	6,22	6,30	6,38
2. Elastisitas Pertumbuhan terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
3. Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	172.710	172.761	172.814	172.867	172.920	172.975	173.030
4. Pertumbuhan Angkatan Kerja (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5. Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	179.655	179.687	179.719	179.752	179.784	179.816	179.848
6. Jumlah Penganggur (jiwa)	6.945	6.926	6.906	6.885	6.863	6.841	6.818
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,87	3,85	3,84	3,83	3,82	3,80	3,79

## SKENARIO NORMAL: BUSINESS AS USUAL

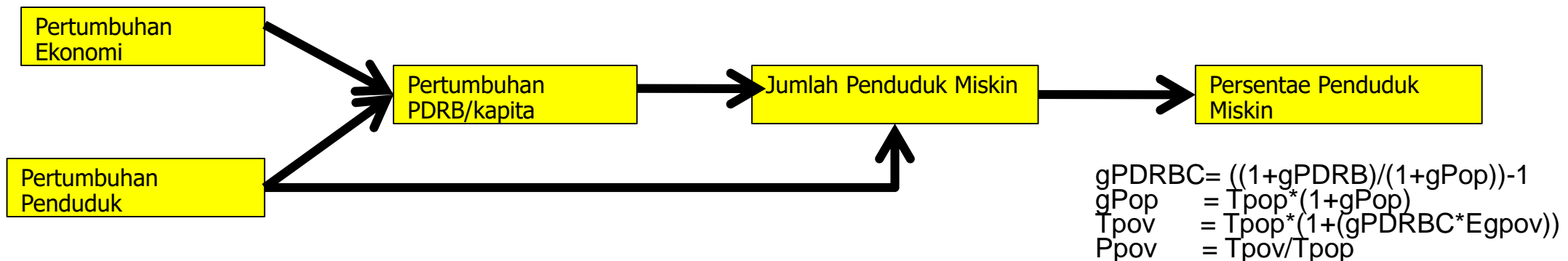
INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87	5,90	5,92	5,95	5,97	5,99	6,01
2. Elastisitas Pertumbuhan terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
3. Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	172.710	172.761	172.812	172.863	172.915	172.967	173.019
4. Pertumbuhan Angkatan Kerja (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5. Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	179.655	179.687	179.719	179.752	179.784	179.816	179.848
6. Jumlah Penganggur (jiwa)	6.913	6.926	6.907	6.888	6.869	6.849	6.829
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	3,85	3,84	3,83	3,82	3,81	3,80

# EXERCISE

## PENURUNAN KEMISKINAN

### SKENARIO OPTIMIS: AKSELERASI (PERCEPATAN) DAN TRANSFORMASI (PERUBAHAN)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertumbuhan ekonomi (target) ( <i>gPDRB</i> )	5,87	6,05	6,24	6,43	6,61	6,79	6,97
2. Pertumbuhan PDRB/kapita (persen) ( <i>gPDRBC</i> )	2,91	3,20	3,49	3,67	3,86	4,04	4,22
3. Elastisitas pertumbuhan thd kemiskinan ( <i>Egpov</i> )	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017	-0,0017
4. Pertumbuhan penduduk (persen) ( <i>gPop</i> )	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
5. Jumlah penduduk total (ribu orang) ( <i>Tpop</i> )	389.039	395.069	401.193	407.411	413.726	420.139	426.651
6. Jumlah penduduk miskin (ribu orang) ( <i>Tpov</i> )	36.661	36.461	36.245	36.018	35.782	35.537	35.282
7. Persentase penduduk miskin (persen) ( <i>Ppov</i> )	9,42	9,23	9,03	8,84	8,65	8,46	8,27



# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN

## SKENARIO MODERAT: AKSELERASI (PERCEPATAN)

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87	5,96	6,04	6,13	6,22	6,30	6,38
2. Pertumbuhan PDRB per kapita (%)	2,91	3,10	3,29	3,38	3,46	3,55	3,63
3. Elastisitas Pertumbuhan terhadap Pengurangan Kemiskinan	-0,0015	-0,0015	-0,0015	-0,0015	-0,0015	-0,0015	-0,0015
4. Pertumbuhan Penduduk (%)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
5. Jumlah penduduk (jiwa)	389.039	395.069	401.193	407.411	413.726	420.139	426.651
6. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	36.721	36.550	36.369	36.185	35.997	35.806	35.611
7. Tingkat Kemiskinan (%)	9,44	9,25	9,07	8,88	8,70	8,52	8,35

## SKENARIO NORMAL: BUSINESS AS USUAL

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,87	5,90	5,92	5,95	5,97	5,99	6,01
2. Pertumbuhan PDRB per kapita (%)	2,91	3,04	3,17	3,20	3,22	3,24	3,26
3. Elastisitas Pertumbuhan terhadap Pengurangan Kemiskinan	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
4. Pertumbuhan Penduduk (%)	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
5. Jumlah penduduk (jiwa)	389.039	395.069	401.193	407.411	413.726	420.139	426.651
6. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	36.813	36.701	36.585	36.468	36.351	36.233	36.115
7. Tingkat Kemiskinan (%)	9,46	9,29	9,12	8,95	8,79	8,62	8,46

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH RPJMD  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2017-2022**

# CONTOH IDENTIFIKASI MASALAH DAN ISU STRATEGIS KABUPATEN

Kabupaten	Fakta (Data dan Informasi Statistik, dan Pendapat)		Analisis Masalah atau Faktor Penyebab <sup>1)</sup>						Jumlah Skala <sup>2)</sup>	Urutan Prioritas <sup>3)</sup>	Isu Strategis
			SDA	SDM	PRA	MOD	LEM	IPTEK			
	Potensi	Masalah									
	• Pertanian Pangan: padi dan palawija	• Tingkat produktivitas Sangat Rendah • Harga jual rendah • Pendapatan rendah	1	3	3	4	4	5	29	3	• Pelatihan petani • Pembangunan prasarana • Penyediaan modal • Pengembangan IPTEK
	• Pertanian Hortikultura	• Tingkat produktivitas Sangat Rendah • Harga jual rendah • Pendapatan rendah	1	3	3	4	4	5	30	2	• Pelatihan petani • Pembangunan prasarana • Penyediaan modal • Pengembangan IPTEK
	Kelautan dan Perikanan	• Harga jual rendah • Pendapatan rendah	2	3	4	5	4	5	31	1	• Pelatihan petani • Pembangunan prasarana • Penyediaan modal • Pengembangan IPTEK
	• Pertanian Pangan: padi dan palawija	• Tingkat produktivitas Sangat Rendah • Harga jual rendah • Pendapatan rendah	1	2	3	4	4	4	24	4	• Pelatihan petani • Pembangunan prasarana • Penyediaan modal • Pengembangan IPTEK

- Identifikasi masalah dan faktor penyebab dilakukan dengan menganalisis ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan Prasarana (PRA), kecukupan Modal (MOD), kesiapan Kelembagaan (LEM) dan kesiapan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- Analisis masalah dilakukan dengan memberikan skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar dan (5) Sangat Besar.

# PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN 2017-2022

Prioritas Pembangunan	Progam/ Kegiatan	SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan pertanian pangan dan palawija	Peningkatan Produksi Padi • Pengadaan benih • Pengadaan obat-obatan	Dinas Pertanian	Meningkatnya produksi padi sebesar 10%	Jumlah produksi padi											
	<b>MASUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN</b>														
	Penyediaan modal	Dinas Koperasi	Tersedia-nya modal bagi 30 kelompok tani	Jumlah kelompok tani penerima modal											
	<b>MASUKAN RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM</b>														
	Pembangunan tanggul	Dinas PU	Terbangunnya tanggul 2 km	Panjang tanggul											
	<b>MRENCANA STRATEGIS DINAS IRIGASI</b>														
	Pembangunan jalan Desa	Dinas PU	Terbangunnya jalan desa 6 km	Panjang jalan desa											
<b>RENCANA STRATEGIS DINAS PU</b>															
Peningkatan peran KUD	Dinas Koperasi	Meningkatnya nilai usaha KUD	Jumlah penjualan KUD												
<b>RENCANA STRATEGIS DINAS KUMKM</b>															
Pengolahan hasil pertanian	Dinas Perindustrian	Meningkatnya produksi jagung olahan 10%	Jumlah produksi jagung olahan												
<b>RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG</b>															
Perluasan Pemasaran	Dinas Perdagangan	Meningkatnya nilai perdagangan 15%	Jumlah penjualan padi olahan												
<b>RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAG</b>															



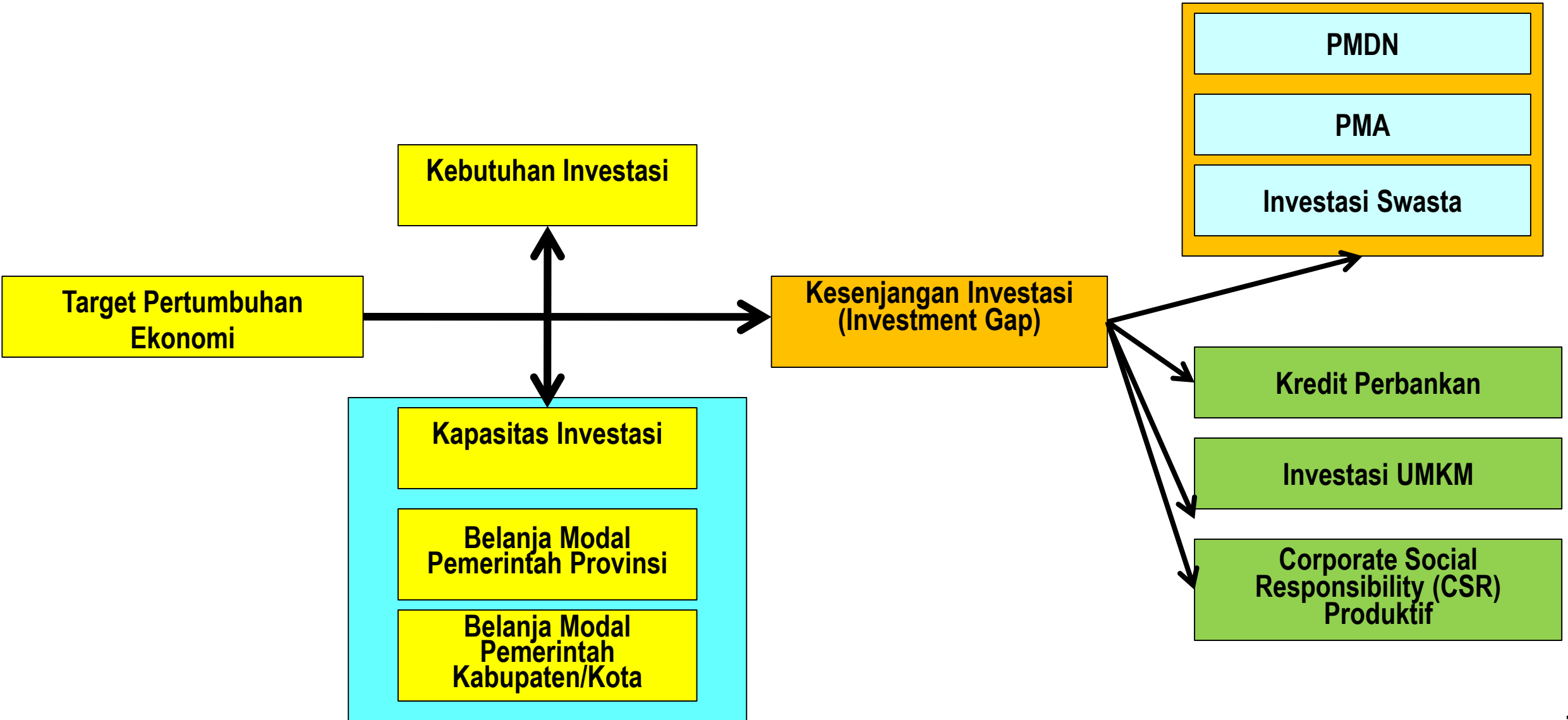


**RENCANA INVESTASI DAN RENCANA  
PENDANAAN PROGRAM RPJMD  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2017-2022**

# PRIORITAS INVESTASI

1. RPJMD 2017-2022 harus memuat alokasi sumber daya secara jelas khususnya untuk wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
2. Investasi harus mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
3. Investasi harus berdampak bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah daerah dan penguatan daya dukung lingkungan secara berkesinambungan.
4. Investasi harus mendorong keterkaitan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan dan pusat-pusat perdagangan daerah.
5. Rencana investasi harus jelas, terukur dan terpadu yang melibatkan SKPD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, Perbankan dan Swasta.

# SUMBER PENDANAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



# SUMBER PENDANAAN INVESTASI

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi						
2	ICOR						
3	Tingkat depresiasi (%)						
4	Tingkat tabungan (%)						
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)						
6	Tingkat Inflasi (%)						
<b>7</b>	<b>Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)</b>						
<b>8</b>	<b>Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)</b>						
	a. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten (Rp. Miliar)						
	b. Belanja Modal Pemerintah Kab/kota (Rp. Miliar)						
<b>9</b>	<b>Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)</b>						
10	Perkiraan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)						
11	Perkiraan Investasi Swasta (Rp. Miliar)						
12	Perkiraan Investasi Swasta PMDN berjalan (Rp. Miliar)						
13	Perkiraan Investasi Swasta PMA berjalan (Rp. Miliar)						
<b>14</b>	<b>Kebutuhan Investasi Swasta Baru</b>						

**TERIMA KASIH.**